



**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PEREKONOMIAN
DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK**

OLEH

NATASYA YUSTINA WIDYA NINGRUM



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

MALANG

2020



**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PEREKONOMIAN
DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK**

OLEH

Natasya Yustina Widya Ningrum

165040118113004

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS PERTANIAN

JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

MALANG

2020



PERNYATAAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa segala pernyataan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian saya sendiri, dengan bimbingan komisi pembimbing. Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan tujuannya dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Malang, Desember 2020

Natasya Yustina Widya Ningrum

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Perekonomian Daerah di Kabupaten Nganjuk

Nama Mahasiswa : Natasya Yustina Widya Ningrum

NIM : 165040118113004

Jurusan : Sosial Ekonomi Pertanian

Program Studi : Agribisnis

Disetujui

Pembimbing Utama,

Dr. Fahriyah, SP., M.Si.
NIP. 197806142008122003

Pembimbing Pendamping,

Alia Fibriantingtyas, SP., MP.
NIK. 2016099002052001

Diketahui,
Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian



Toy Toiba, SP., MP., Ph.D
NIP. 197209082003121001

Tanggal Persetujuan :



LEMBAR PENGESAHAN

MAJELIS PENGUJI

Mengesahkan

Penguji I

Dr. Dwi Retno Andriani, SP.,MP.
NIP. 197908252008122002

Penguji II

Wisnu Ari Gutama, SP., MMA.
NIP. 197609142005011002

Penguji III

Dr. Fahriyah, SP.,M.Si.
NIP. 197806142008122003

Penguji IV

Alia Fibriantingtyas, SP.,MP.
NIK. 2016099002052001

Tanggal :

RINGKASAN

Natasya Yustina Widya Ningrum. 165040118113004. Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Perekonomian Daerah di Kabupaten Nganjuk. Di bimbing oleh Dr. Fahriyah, SP., MSi sebagai Pembimbing Utama dan Alia Fibrianingtyas, SP., MP Sebagai Pembimbing Pendamping.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat kondisi perekonomian di suatu wilayah. Masyarakat yang tergolong sejahtera adalah masyarakat yang telah mampu memenuhi kebutuhan fisik, rohani maupun sosialnya. Adapun dalam memenuhi segala kebutuhan tersebut, masyarakat harus memiliki pendapatan. Tingkat penghasilan masyarakat dalam semua segi perekonomian di suatu daerah dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Kabupaten Nganjuk merupakan wilayah yang memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) urutan ke 5 dari 7 kabupaten/kota yang berada di Karisidenan Kediri. Adapun kontribusi sektor tertinggi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yakni berasal sektor pertanian. Hal tersebut juga dilihat dari tingginya tenaga kerja pada sektor tersebut..

Studi ini bertujuan untuk menganalisis (1) struktur tenaga kerja, (2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (3) Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini berdasarkan runtut waktu (*time series*) tahun 2002-2018. Metode yang dilakukan yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif menggunakan linier regresi berganda menggunakan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) untuk melihat pengaruh variabel secara parsial dan simultan

Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa struktur tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk lebih didominasi oleh tingginya jumlah pencari kerja yang berpendidikan terakhir SMA Sederajat. Kemudian analisis menggunakan metode regresi linier berganda dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas yang digunakan yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) per kapita dengan $F_{hitung} = 29,646$. Secara parsial hasil data menunjukkan bahwa variabel IPM dan PAD berpengaruh signifikan serta variabel TPAK dan Investasi tidak berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyarankan agar pemerintah daerah lebih meninjau sumberdaya manusia di Kabupaten Nganjuk melalui pelatihan-pelatihan keterampilan untuk tenaga kerja. Hal tersebut diharapkan mampu menunjang tenaga kerja agar dapat menjalankan aktifitas ekonomi dan mendukung peningkatan perekonomian daerah.

SUMMARY

Natasya Yustina Widya Ningrum. 165040118113004. The Influence of Human Resources on the Regional Economy in Nganjuk Regency. Supervised by: Dr. Fahriyah, SP., M.Si and Alia Febriningtyas, SP., MP.

Public welfare is one of the benchmarks in seeing the economic conditions in an area. Communities that are classified as prosperous are people who have been able to meet their physical, spiritual and social needs. As for meeting all these needs, the community must be able to have income. The level of community income in all aspects of the economy in an area can be seen through the value of the Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita.

Nganjuk Regency is an area that has the value of Gross Regional Domestic Product (GRDP) ranked 5 out of 7 districts / cities located in the Kediri Residence. The highest sector contribution in Gross Regional Domestic Product (GRDP) comes from the agricultural sector. This can also be seen from the high workforce in the agricultural sector.

This study aims to analyze (1) the structure of the workforce, (2) the value of the Labor Force Participation Rate (LFPR), the Human Development Index (HDI), investment and Local Government Revenue (LGR), (3) the effect of the Labor Force Participation Rate (LFPR), Human Development Index (HDI), investment and Local Government Revenue (LGR) to Gross Regional Domestic Product (GRDP) per capita in Nganjuk Regency. This research was conducted at the time series of 2002-2018. The method used is descriptive analysis and quantitative analysis using multiple linear regression to see each variable's effect on GRDP per capita.

The results of this study indicate that the structure of the workforce in Nganjuk Regency is more dominated by the high number of job seekers with the latest high school education. Then the analysis using the multiple linear regression method in this study shows that simultaneously the independent variables used, namely the Labor Force Participation Rate (LFPR), Human Development Index (HDI), investment and Local Government Revenue (LGR) have a significant effect on the dependent variable, namely Gross Regional Domestic Product at Constant Price (GRDP) per capita with F count = 29.646. Partially the results of the data show that the HDI and LGR variables have a significant effect and the LFPR and Investment variables do not have a significant effect. Based on these results, the researchers suggest that the local government should look more at the human resources in Nganjuk Regency through skills training for the workforce. This is expected to be able to support the workforce in order to carry out economic activities and support the improvement of the regional economy.

KATA PENGANTAR

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat kondisi perekonomian di suatu wilayah. Kondisi perekonomian dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Peningkatan nilai PDRB per kapita tidak lepas dari peran sumber daya manusia yang berada di suatu wilayah tersebut. Oleh sebab itu, indikator yang dipilih dalam menganalisis PDRB per kapita yakni, ketenagakerjaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga skripsi yang berjudul “Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Perekonomian Daerah di Kabupaten Nganjuk” dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Fahriyah, SP.,M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
2. Ibu Alia Fibriantingtyas, SP.,MP selaku dosen pembimbing pendamping yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
3. Kedua orang tua penulis yang mendukung penulis dari segi moril dan material.
4. Teman-teman penulis yang telah memotivasi penulis untuk rajin dalam mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, oleh sebab itu penulis sangat menerima kritik dan saran demi kebaikan bersama. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, Desember 2020

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
RINGKASAN	i
SUMMARY	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Batasan Masalah.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Ekonomi Pembangunan.....	14
2.3 Kesejahteraan Masyarakat.....	15
2.4 Produk Domestik Regional Bruto.....	15
2.5 Ketenagakerjaan.....	16
2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	17
2.7 Pembangunan Manusia.....	18
2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	19
2.9 Investasi.....	21
2.10 Pendapatan Daerah.....	22
2.11 Pendapatan Asli Daerah.....	23
III. KERANGKA TEORITIS	24
3.1 Kerangka Pemikiran.....	24



3.2 Hipotesis	27
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	28
IV. METODE PENELITIAN	29
4.1 Pendekatan Penelitian	29
4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian	29
4.3 Teknik Pengumpulan Data	29
4.4 Metode Analisis data	30
4.4.1 Analisis Deskriptif	30
4.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda	30
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
5.1 Profil Kabupaten Nganjuk	33
5.1.1 Kondisi Geografis	33
5.1.2 Kondisi Demografi	33
5.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk	35
5.2 Struktur Tenaga Kerja	36
5.3 Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40
5.3.1 Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	40
5.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	41
5.3.3 Investasi	43
5.3.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	44
5.4. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB per kapita	45
5.4.1 Produk Domestik Regional Bruto	45
5.4.2 Uji Asumsi Klasik	47
5.4.3. Analisis Regresi Linier Berganda	49
5.4.4 Pengujian Hipotesis	50
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	56
6.1 Kesimpulan	56
6.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	65



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Jumlah Tenaga Kerja dan PDRB ADHK di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018.....	6
2.	Perbandingan Metode Lama-Baru Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	20
3.	Pengukuran PDRB per kapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	28
4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018.....	34
5.	Jumlah Pencari Kerja, Tenaga Kerja dan Lowongan Kerja di Kabupaten Nganjuk.....	36
6.	Tabel Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Berdasarkan Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Nganjuk.....	38
7.	Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2013.....	38
8.	Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2018.....	39
9.	Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nganjuk periode tahun 2002-2018.....	40
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nganjuk periode tahun 2002-2018.....	42
11.	Investasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018.....	43
12.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nganjuk periode tahun 2002-2018.....	44
13.	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	49
14.	Model Summary Data TPAK, IPM, Investasi dan PAD Terhadap PDRB Per Kapita di Kabupaten Nganjuk.....	51
15.	Hasil Uji T.....	52



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Jumlah Produksi Padi, Jagung dan Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018	4
2.	Skema kerangka pemikiran pengaruh TPAK, IPM, Investasi dan PAD Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Nganjuk.....	26



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Jumlah Tenaga Kerja, Pencari Kerja dan Lowongan Kerja di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018	65
2.	Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Nganjuk Tahun 2015, 2017 dan 2018.	66
3.	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Terakhir Kabupaten Nganjuk.....	67
4.	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018	70
5.	Nilai PDRB ADHK Per Kapita, TPAK, IPM, Investasi dan PAD di Kabupaten Nganjuk.....	71
6.	Nilai Ln PDRB ADHK Per Kapita, Ln TPAK, Ln IPM, Ln Investasi dan Ln PAD di Kabupaten Nganjuk	72
7.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (PDRB ADHK 2000) di Kabupaten Nganjuk.....	73
8.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (PDRB ADHK 2010) di Kabupaten Nganjuk.....	75
9.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (PDRB ADHK 2010) di Kabupaten Nganjuk Lanjutan.....	76
10.	Persentase Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (PDRB ADHK 2000) di Kabupaten Nganjuk.....	77
11.	Persentase Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (PDRB ADHK 2010) di Kabupaten Nganjuk.....	78
12.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Berdasarkan Tahun 2000 dan 2010 di Kabupaten/Kota se Karisidenan Kediri	79
13.	Data Hasil Uji Asumsi Klasik.....	80
14.	Data Hasil Uji Hipotesis	83

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat kondisi perekonomian di suatu wilayah. Masyarakat yang tergolong sejahtera adalah masyarakat yang telah mampu memenuhi kebutuhan fisik, rohani maupun sosialnya (Sunarti, 2012). Adapun dalam memenuhi segala kebutuhan tersebut, masyarakat harus memiliki pendapatan. Tingginya tingkat pendapatan tidak lepas dari tingkat pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh individu.

Keterampilan dan pengetahuan merupakan modal manusia dalam menunjukkan kualitas, hal ini berarti kualitas mampu menjadi nilai jual dalam pasar tenaga kerja. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang baik diharapkan dapat memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Peningkatan pendapatan masyarakat biasanya ditandai dengan meningkatnya produktivitas yang dihasilkan. Penduduk yang memiliki penghasilan tinggi akan cenderung memiliki pengeluaran belanja yang tinggi, hal ini menyebabkan tumbuhnya laju perekonomian (Mirza, 2012).

Tingkat penghasilan masyarakat dalam semua segi perekonomian di suatu daerah dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang naik sepanjang tahun akan membuat laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga tinggi. Peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga akan menggambarkan kemakmuran di suatu daerah tersebut. Pendekatan yang biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Kuncoro, 2012).

Kemudian menurut Sukirno (2012), dalam melihat pergeseran pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Provinsi yang memiliki nilai PDRB urutan pertama di Indonesia yakni, DKI Jakarta dengan nilai Rp 1.742.085 Miliar. Sementara itu, nilai PDRB Jawa Timur memperoleh urutan ke dua di Indonesia yakni sebesar Rp 1.563.756 Miliar. Hal tersebut disebabkan karena luas wilayah Jawa Timur yang mencapai 47.992 km² dengan populasi penduduk sebanyak 36.698.631 jiwa. Luasnya wilayah dan populasi



penduduk yang tinggi membuat aktifitas produksi juga tinggi, hal tersebut mempengaruhi tingkat PDRB di wilayah tersebut (Badan Pusat Statistik, 2019).

Table 1. Nilai PDRB Kabupaten/Kota di Karisidenan Kediri Tahun 2018

Kabupaten/Kota	PDRB ADHK 2018 (Miliar Rupiah)	Peringkat PDRB ADHK
Kota Kediri	85.336	1
Kabupaten Kediri	27.789	2
Kabupaten Tulungagung	25.920	3
Kabupaten Blitar	24.286	4
Kabupaten Nganjuk	17.374	5
Kabupaten Trenggalek	12.162	6
Kota Blitar	4.567	7

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Diolah)

PDRB Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota yang memiliki nilai berfluktuatif setiap tahunnya. Kabupaten Nganjuk termasuk dalam urutan nilai PDRB ke 18 dari 38 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Tabel 1, dijelaskan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki nilai PDRB sebesar Rp 17.374 Miliar sehingga memperoleh urutan ke 5 dari 7 kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Karisidenan Kediri. Hal tersebut disebabkan mayoritas kontribusi sektor di Kabupaten Nganjuk yakni sektor pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik (2019) mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai petani dibandingkan profesi lainnya membuat perkembangan wilayah berjalan kurang pesat

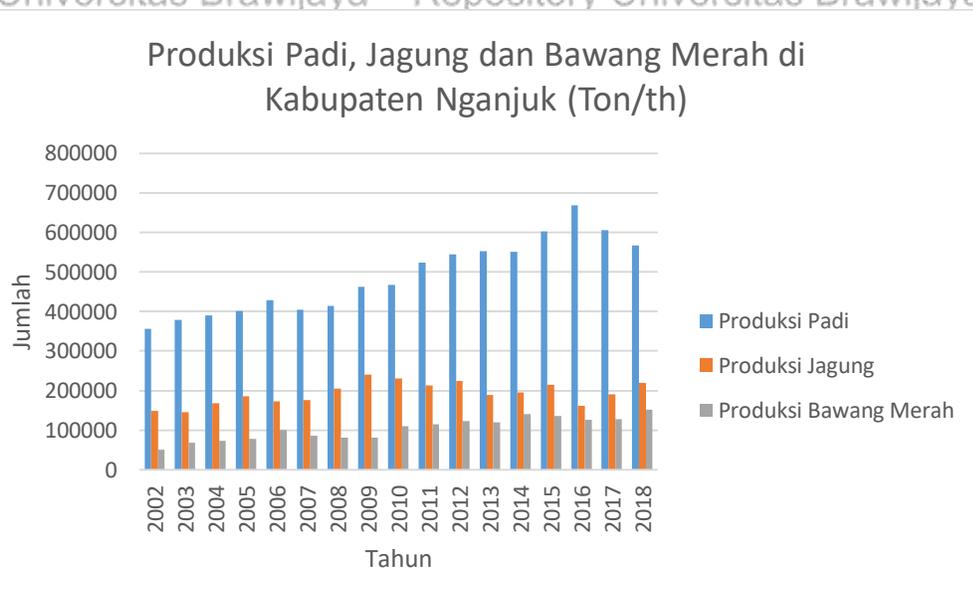
Adapun tenaga kerja pada sektor-sektor di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 umumnya bekerja di sektor pertanian (41,04 persen). Kemudian disusul sektor perdagangan (20,50 persen) dan sektor industri (12,35 persen). Sektor lainnya tersebar seperti sektor pertambangan dan penggalian, angkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, *real estate*, serta usaha persewaan dan jasa perusahaan yang memiliki persentase di bawah 7 persen. Penyerapan tenaga kerja menurut sektor menggambarkan kinerja sektor secara ekonomis yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) oleh tenaga kerja yang terserap pada masing-masing sektor.

Sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak tentu saja akan dapat



menciptakan nilai tambah yang lebih besar (Badan Pusat Statistik, 2019). Tenaga kerja di sektor pertanian yang tinggi tidak terlepas dari sumber daya alam mendukung khususnya areal persawahan dan perkebunan. Kabupaten Nganjuk sendiri memiliki berbagai macam jenis komoditas yang dihasilkan oleh petani sesuai musim tanam masing-masing. Komoditas tersebut meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Adapun komoditas unggulan yang memiliki hasil produksi yang tinggi di Kabupaten Nganjuk yakni komoditas padi, jagung dan bawang merah.

Jumlah produksi dari masing-masing komoditas tersebut disampaikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah Produksi Padi, Jagung dan Bawang Merah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2019 (Diolah).

Berdasarkan pada Gambar 1, dijelaskan bahwa komoditas padi, jagung dan bawang merah merupakan komoditas yang memiliki produksi yang tinggi di Kabupaten Nganjuk. Tingginya hasil produksi di sektor pertanian mencerminkan bahwa masyarakat Kabupaten Nganjuk mayoritas berprofesi sebagai petani. Produksi terbesar komoditas padi terdapat pada tahun 2016 yakni mencapai 669.109,2 ton. Produksi tertinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan luas panen hingga 6.856 Ha pada tahun 2016. Kemudian produksi terbesar komoditas jagung terdapat pada tahun



2009 yakni mencapai 239.881,7 ton. Peningkatan tersebut disebabkan karena tingginya hasil produksi yang merata pada setiap kecamatan. Total produksi jagung di Kabupaten Nganjuk naik 17,41 persen dari tahun 2008. Sedangkan produksi terbesar komoditas bawang merah terdapat pada tahun 2018 yakni sebesar 152.408,4 ton,

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hukom (2014) menyebutkan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor informal yang mengandalkan tenaga kerja *low skill, low paid* serta tanpa proteksi sosial membuat penduduk yang bekerja di sektor tersebut tidak dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Adanya jumlah lapangan pekerjaan formal yang bersifat stagnan dan penetapan kerja kontrak juga menjadi masalah penting yang berkaitan dengan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi. Sedangkan menurut Sulistiawati (2012), menjelaskan bahwa terdapat permasalahan dimana pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki nilai berfluktuatif. Perkembangan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh penyerapan tenaga kerja serta investasi yang berada di wilayah tersebut. Selanjutnya dijelaskan juga nilai IPM di Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan IPM di negara-negara ASEAN lainnya. Nilai IPM juga akan menjelaskan bagaimana kualitas sumberdaya manusia yang berada di suatu wilayah sehingga hal tersebut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, fenomena mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga terjadi di Kabupaten Nganjuk. Nilai PDRB di Kabupaten Nganjuk umumnya dipengaruhi sektor pertanian. Tingginya pengaruh tenaga kerja di sektor tersebut membuat pertanian memiliki peran penting dalam menyediakan tenaga kerja. Tenaga kerja yang tersedia untuk mendorong perkembangan PDRB juga harus memiliki kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik sehingga dapat menunjang nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya tenaga kerja yang berkualitas akan menaikkan minat investor dalam melakukan kegiatan investasi modal yang mana akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan investasi juga diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi di Kabupaten Nganjuk tidak hanya di sektor pertanian namun juga sektor-sektor lainnya.



Penelitian mengenai pengaruh sumber daya manusia terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Nganjuk dilakukan berdasarkan data *time series* tahun 2002-2018.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat mempengaruhi perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini juga diharapkan membantu pengambil kebijakan dalam meningkatkan perekonomian daerah melalui tenaga kerja, pembangunan manusia, investasi dan pendapatan daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Tenaga kerja yang produktif dan pembangunan manusia yang tinggi akan menunjang adanya peningkatan kesejahteraan di daerah tersebut. Selanjutnya dalam melihat tolak ukur kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi kemampuan daya beli masyarakat dimana hal tersebut akan mempengaruhi kesejahteraan dari masyarakat (Arsyad, 2010).

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kerja dan PDRB ADHK di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018

Tahun	Tenaga Kerja (Jiwa)	Produk Domestik Regional Bruto ADHK (Miliar Rupiah)
2002	501.774	3181,6
2003	480.622	3325,1
2004	563.760	3496,7
2005	470.026	3695,7
2006	525.370	3913,0
2007	520.022	4152,6
2008	517.169	4400,7
2009	540.873	4665,0
2010	485.507	5388,4
2011	480.019	12061,2
2012	508.859	12766,9
2013	523.384	13473,7
2014	513.031	14161,5
2015	506.132	14875,7
2016	506.221	15661,8
2017	487.899	16485,6



Tahun	Tenaga Kerja (Jiwa)	Produk Domestik Regional Bruto ADHK (Miliar Rupiah)
2018	541.279	17374,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2019 (Diolah)

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah tenaga kerja umumnya akan meningkatkan jumlah produksi dimana hal tersebut dapat mempengaruhi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Todaro, 2006). Berdasarkan Tabel 1. Kabupaten Nganjuk memiliki jumlah tenaga kerja yang berfluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah unit lowongan pekerjaan serta keputusan perusahaan/instansi dalam melakukan perekrutan maupun pemutusan kerja. Kemudian untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK memiliki nilai yang terus meningkat. Hal tersebut dijabarkan pada Lampiran 7, yang menampilkan bahwa sektor-sektor ekonomi memberikan kontribusi yang terus meningkat. Adapun sektor yang memiliki kontribusi tinggi terhadap PDRB ADHK yakni sektor pertanian dan sektor perdagangan sehingga memiliki potensi jumlah tenaga kerja yang tinggi pada sektor tersebut. Sedangkan pada data Lampiran 12, diperoleh bahwa peningkatan nilai PDRB ADHK masih membuat Kabupaten Nganjuk memiliki nilai PDRB yang rendah yakni urutan ke 5 dari 7 kabupaten/kota di Karisidenan Kediri.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nganjuk?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Nganjuk?



1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah untuk penelitian meliputi :

1. Kesejahteraan masyarakat memiliki tujuh indikator yakni kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi, serta IPM dan kemiskinan. Penelitian ini tidak melihat hubungan dan pengaruh setiap indikator dari kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Peneliti hanya menggunakan indikator IPM, ketenagakerjaan serta PDRB per Kapita. Oleh karena itu indikator IPM dan Ketenagakerjaan digunakan untuk melihat sumber daya manusia serta PDRB per kapita digunakan untuk melihat perekonomian daerah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam menunjang perekonomian daerah dilihat dari data investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Peneliti menggunakan data *time series* tahun 2002-2018 sebagai acuan penelitian.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui struktur tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk
2. Mengetahui nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nganjuk
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB per kapita di Kabupaten Nganjuk

1.5. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademis dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan untuk mengembangkan perekonomian daerah di Kabupaten Nganjuk.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Sasana (2009), mengenai analisis dampak pertumbuhan ekonomi, kesenjangan antar daerah dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam era desentralisasi fiskal bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kesenjangan, dan pengaruh tenaga kerja terhadap kesejahteraan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan yakni analisis jalur (*path analysis*) menggunakan data *time series* dari tahun 2001-2005, dan data *cross section* yang terdiri atas 35 kabupaten/kota. Perhitungan koefisien dalam analisis jalur didekati melalui analisis regresi dengan variabel yang dibakukan (*standardise regression*). Hasil dari penelitian ini yakni adanya berpengaruh signifikan serta hubungan yang positif dari pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja terserap terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan adanya pengaruh signifikan dan hubungan negatif dari kesenjangan ekonomi antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Bhakti *et al.* (2012), melakukan penelitian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia periode 2008-2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, rasio ketergantungan, konsumsi rumah tangga untuk makan, APBD untuk pendidikan, dan APBD untuk kesehatan terhadap IPM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yakni regresi data panel yakni model regresi *common effect*, model regresi *fixed effect*, dan *random effect*. Berdasarkan data yang ada maka diperoleh hasil bahwa PDRB dan APBD untuk kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia. Sedangkan Rasio ketergantungan dan konsumsi rumah tangga berpengaruh negatif terhadap IPM di 33 provinsi di Indonesia.

Selanjutnya Sulistiawati (2012), melakukan penelitian tentang pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh



investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh investasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, serta pengaruh pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi di Indonesia.

Pengumpulan data menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan instansi lain yang terkait berupa data *time series* dari tahun 2006-2010. Teknik analisis menggunakan jalur (*path analysis*) digunakan untuk menguji besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel X_1 terhadap Y_1 dan Y_2 serta dampaknya pada Y_3 .

Adapun hasil penelitian menggambarkan bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja provinsi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga tidak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hukom (2014), mengenai hubungan ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Analisis data menggunakan model regresi linier sederhana dan berganda. Model linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh ketenagakerjaan terhadap perubahan struktur ekonomi di Indonesia, serta pengaruh perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, model regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa ketenagakerjaan berpengaruh terhadap kesejahteraan melalui perubahan struktur di Indonesia. Hal ini berarti penyerapan tenaga kerja pada sektor kapitalis (non pertanian) terjadi tanpa mengurangi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Maka dari itu adanya peningkatan kedua sektor tersebut menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi.

Suwandika (2015), melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan



tingkat pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menghasilkan data yakni nilai PAD dan Investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, PAD berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Bali. PAD berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi dan Investasi berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Muqorrobin (2017), mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur berpengaruh negatif, artinya semakin tinggi kualitas Indeks Pembangunan Manusia, maka pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur akan mengalami penurunan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kristina (2017), tentang pengaruh pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja terhadap produk domestik regional bruto (38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja serta pengaruhnya terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis data yang digunakan yakni analisis linier berganda dengan menggunakan data panel dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menghasilkan data bahwa Pendapatan Asli Daerah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,99 (99 persen) variabel bebas yaitu pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja dapat menjelaskan produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi sisanya 0,01 (1 persen) dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.



Pebrina (2018), melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh tingkat investasi, pendapatan asli daerah dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat investasi, pendapatan asli daerah, dan tenaga kerja terhadap PDRB Provinsi Jambi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan *Software Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows*. Hasil penelitian meliputi tingkat investasi dalam penelitian ini secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Nilai investasi di Provinsi Jambi tergolong masih rendah, antara lain dikarenakan proses perijinan yang sangat rumit sehingga menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kemandirian daerah, sehingga nilai dari PAD ini diharapkan dapat tumbuh dari tahun ke tahun. Dalam penelitian ini PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Dengan determinasi parsial yang mencapai 75,7 persen terhadap PDRB, diharapkan dengan pembelanjaan yang tepat sasaran dan di sektor yang potensial maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Selanjutnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian diperoleh bahwa tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sasana (2009), Sulistiawati (2012), dan Hukom (2014), menganalisis kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemudian Bhakti *et al* (2012), langsung menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tujuan penelitian. Pebrina (2018), menganalisis pengaruh investasi, pendapatan asli daerah, dan tenaga kerja terhadap PDRB. Sedangkan Kristina (2017), menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, indeks pembangunan manusia dan tenaga kerja terhadap PDRB. Penelitian yang dilakukan Muqorrobin (2017), juga menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap PDRB. Metode analisis yang digunakan oleh Sasana (2009), Sulistiawati (2012), yakni analisis jalur (*path analysis*). Adapun metode yang digunakan oleh Bhakti *et al* (2012) dan Kristina (2017), yakni regresi data panel meliputi model regresi



common effect, model regresi *fixed effect*, dan *random effect*. Sedangkan metode analisis yang digunakan oleh Hukom (2014), dan Pebrina (2018), menggunakan analisis regresi linier berganda dan Muqorrobin (2017), menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan *Software Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows*.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Perekonomian Daerah di Kabupaten Nganjuk”. Hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya, penulis menggunakan indikator PDRB per kapita untuk mewakili perekonomian daerah dan menggunakan indikator TPAK, IPM, investasi dan PAD untuk melihat pengaruhnya.

2.2 Ekonomi Pembangunan

Pembangunan adalah perubahan yang berguna untuk mewujudkan suatu sistem sosial dan ekonomi yang menjadi kehendak suatu bangsa (Harun, 2011). Proses pembangunan juga menghendaki perubahan struktur ekonomi, seperti pertanian ke industri atau jasa dan perubahan kelembagaan baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat (Subandi, 2011).

Adapun pembangunan menurut (Tjahja, 2000) adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Konsep pembangunan berkelanjutan yang didukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrat masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup sesuai perkembangan jaman. Oleh karena itu pendekatan masyarakat dititik beratkan pada lingkungan sosial ekonomi yang bercirikan:

- a. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan diarahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti terwujudnya pemerataan pendapatan dan mewujudkan keadilan.
- c. Pembangunan yang di orientasikan kepada masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia.



2.3 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan masyarakat, memuat bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup. Salah satu tolak ukur dalam melihat kesejahteraan masyarakat yakni melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

2.4 Produk Domestik Regional Bruto

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik itu atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah tertentu dan dapat juga dikatakan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2013).

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat perubahan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB atas dasar harga konstan juga bermanfaat dalam perencanaan ekonomi, proyeksi serta menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun per lapangan usaha (Badan Pusat Statistik, 2016).

Nilai PDRB dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu (a) pendekatan produksi yang menghitung pendapatan wilayah berdasarkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh sektor ekonomi dalam wilayah, (b) pendekatan pendapatan yang menjelaskan tentang pendapatan masyarakat wilayah, serta (c) pendekatan



penggunaan/pengeluaran yang menjelaskan tentang penggunaan akhir dari pendapatan masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2009).

Menurut Suryono (2010), PDRB merupakan nilai tambah atas usaha-usaha masyarakat di suatu wilayah secara simultan. Sedangkan dalam melihat kesejahteraan masyarakat dapat menggunakan PDRB per kapita atau nilai tambah atas usaha-usaha masyarakat di suatu wilayah per individu. PDRB per kapita dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{PDRB per kapita} = \text{PDRB} / \text{Jumlah Penduduk}$$

Keterangan:

PDRB per kapita = Produk Domestik Regional Bruto per kapita

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Jumlah Penduduk = Jumlah Penduduk wilayah pada tahun tertentu.

2.5 Ketenagakerjaan

Konsep ketenagakerjaan merupakan salah satu bagian dari pembelajaran mengenai sumber daya manusia (SDM). Hal tersebut dikarenakan manusia mampu melakukan kegiatan yang bersifat ekonomis berupa menghasilkan barang atau jasa.

Adapun orang yang berada dalam usia kerja tersebut disebut dengan tenaga kerja (Simanjuntak, 1998).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 menjelaskan bahwa :

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Kertonegoro (2001), konsep mengenai ketenagakerjaan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja (*manpower*) atau penduduk usia kerja (UK)



Tenaga kerja merupakan penduduk usia kerja (15-54) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan dan partisipasi dalam aktivitas ketenagakerjaan tersebut

b. Angkatan kerja (*Labor Force*)

Angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang secara kenyataannya ikut dalam kegiatan atau berusaha terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa

c. Bukan Angkatan Kerja (*Unlabor Force*)

Orang yang berada digolongan bukan angkatan kerja merupakan penduduk berusia 15-54 tahun namun kegiatan utama selama seminggu yang lalu adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Apabila seseorang yang sekolah namun bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu, maka individu tersebut tetap termasuk didalam kelompok bukan angkatan kerja.

d. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*labour force participation rate*)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk dalam kelompok umur tersebut, yaitu membandingkan angkatan kerja dengan tenaga kerja

e. Tingkat Pengangguran (*unemployment rate*)

Tingkat pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan, yaitu dengan membandingkan jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja.

2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Menurut Todaro (2006), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran domestiknya juga lebih besar. Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan pertambahan tenaga kerja tersebut.



Menurut Simanjuntak (2005), tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu indikator penunjang di dalam konsep ketenagakerjaan. TPAK menggambarkan persentase perbandingan jumlah angkatan kerja dan penduduk usia kerja (usia > 15 tahun). Perhitungan TPAK dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPAK} = \text{AK/UK} \times 100\%$$

Keterangan :

TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

AK = Angkatan Kerja

UK = Penduduk Usia Kerja

2.7 Pembangunan Manusia

Pada tahun 1990 UNDP (*United Nations Development Programme*) memperkenalkan konsep “Pembangunan Manusia” sebagai paradigma baru model pembangunan. Pembangunan manusia dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan keterampilan mereka.

Menurut UNDP atau *United Nations Development Programme* (1995), ada beberapa konsep penting mengenai pembangunan manusia yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
- b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, konsep pembangunan manusia harus berpusat pada penduduk secara komprehensif dan bukan hanya pada aspek ekonomi semata.
- c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan kemampuan atau kapasitas manusia, tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan kemampuan/kapasitas manusia tersebut secara optimal.
- d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
- e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.



2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

UNDP (*United Nations Development Programme*), memperkenalkan suatu indikator untuk menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur yang dinamakan HDI/IPM. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM terbagi dalam tiga golongan:

- a) $IPM < 50$ (rendah)
- b) $50 \leq IPM < 80$ (sedang/menengah)
- c) $IPM \geq 80$ (tinggi).

Pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin umumnya adalah tenaga kasar. Adanya fasilitas kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas. (Pudjiyanto *et al*, 2015).

Selanjutnya pendidikan juga merupakan modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu indeks yang penting dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks Pendidikan. Semakin memadainya pendidikan, maka pembangunan nasional akan mudah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Diharapkan dengan pendidikan akan mampu menjawab persoalan kemiskinan, rendahnya produktifitas dan juga lambatnya pertumbuhan ekonomi. (Aprillianti, 2016)

Menurut UNDP (*Human Development Report*) (1995) Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga komposisi indikator, yaitu :

- a) Tingkat kesehatan diukur dari harapan hidup saat lahir
- b) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- c) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Kemudian menurut Badan Pusat Statistik (2015), perhitungan IPM dengan menggunakan rata-rata geometrik ini memiliki maksud bahwa pencapaian satu indikator tidak dapat ditutupi oleh capaian indikator lainnya. Secara umum, agar



mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga indikator ini haruslah menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Oleh karena itu, BPS memperbaharui perhitungan IPM dengan menggunakan metode baru. Perbandingan perhitungan IPM dengan metode lama dan metode baru sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Metode Lama-Baru Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dimensi	Metode Lama	Metode Baru
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per kapita menggunakan Produk Domestik Bruto Rasio Gini (PDB)	Pengeluaran per kapita menggunakan Produk Nasional Bruto Rasio Gini (PNB)

Sumber : Badan Pusat Statistik 2016

Berdasarkan Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa Angka Melek Huruf (AMH) pada perhitungan IPM sebelumnya diganti pada tahun 2014 dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dikarenakan AMH tidak dapat menjelaskan tingkat pendidikan antar daerah secara baik digambarkan dari nilai AMH di sebagian besar daerah di Indonesia sudah tinggi. Kemudian penggunaan PDB juga digantikan oleh PNB dikarenakan lebih menggambarkan pendapatan masyarakat di suatu wilayah.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016), perhitungan Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan komponen-komponennya adalah sebagai berikut:

a. Dimensi Kesehatan

$$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$$

Keterangan :

$I_{\text{kesehatan}}$ = Indeks Kesehatan
 AHH = Angka Harapan Hidup

b. Dimensi Pendidikan

$$I_{\text{Pendidikan}} = \frac{HLS + RLS}{2}$$

Keterangan:



I Pendidikan = Indeks Pendidikan

I HLS = Indeks Harapan Lama Sekolah

I RLS = Indeks Rata-rata Lama Sekolah

c. Dimensi Pengeluaran

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{\ln(\text{pengeluaran maks}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

Keterangan:

I Pengeluaran = Indeks Pengeluaran

Pengeluaran = Nilai Pengeluaran per kapita

Berdasarkan perhitungan komoponen diatas, maka nilai IPM dapat dihitung sebagai rata-rata geometric dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Keterangan :

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

I kesehatan = Indeks Kesehatan

I pendidikan = Indeks Pendidikan

I Pengeluaran = Indeks Pengeluaran

2.9 Investasi

Investasi merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Investasi dapat dilakukan oleh swasta, pemerintah atau kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Investasi merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk jangka panjang dapat menaikkan standar hidup masyarakatnya (Mankiw, 2003). Kemudian peningkatan investasi akan meningkatkan kapasitas produksi yang pada akhirnya berujung pada pembukaan lapangan kerja baru sehingga akan mendorong tingkat PDRB di suatu wilayah (Sutawijaya, 2010).

Menurut Simarmata (1984), investasi terbagi pada beberapa jenis, yaitu:

- Investasi baru, yaitu investasi bagi pembuatan sistem produksi baru, baik sebagai bagian dari kegiatan usaha baru untuk produksi maupun perluasan produksi,
- Investasi peremajaan, investasi yang digunakan untuk mengganti barang-barang lama dengan yang baru, tetapi dengan kapasitas produksi yang sama dengan alat yang digantikan



- c. Investasi rasionalisasi, investasi untuk mengganti peralatan lama dengan baru namun menggunakan ongkos produksi yang lebih murah walaupun kapasitas yang sama.
- d. Investasi perluasan, investasi yang digunakan untuk mengganti peralatan lama dengan baru namun menggunakan kapasitas yang lebih besar sedangkan ongkos produksinya masih sama.
- e. Investasi modernisasi, investasi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang baru yang memang prosesnya baru atau memproduksi barang lama dengan proses yang baru.

Selanjutnya berdasarkan teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dalam investasi dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa. Oleh sebab itu dalam berjalannya waktu, pembentukan modal mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih besar (Sukirno, 2007).

Sedangkan menurut teori Neo-Klasik, investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Semakin tinggi perkembangan investasi dibandingkan laju pertumbuhan penduduk, maka semakin tinggi pula perkembangan persediaan barang modal rata-rata per tenaga kerja. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio persediaan barang modal per tenaga kerja cenderung mampu meningkatkan kapasitas produksi per tenaga kerja (Arsyad, 2010).

2.10 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Menurut UU No 33 Tahun 2004, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan



c. Lain-lain penerimaan yang sah

2.11 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2012). Pasal 6 undang-undang tahun 2004 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah disusun oleh sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak merupakan iuran yang diperoleh atau dipaksakan kepada wajib pajak oleh pemerintah. Pada pokoknya pajak memiliki dua peranan utama yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur (Suparmoko, 2002). Pajak daerah yang dipungut berdasarkan peraturan pajak oleh daerah juga bertujuan untuk memenuhi kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut (Mardiasmo, 2002).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dikarenakan individu atau badan hukum menggunakan jasa dan barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk (Prawiroharjo, 1984).

c. Bagian Laba Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dalam memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada keuntungan, akan tetapi justru dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanduaan umum. (Kaho, 1998).

d. Penerimaan Dinas-Dinas dan Pendapatan lain yang disahkan.

Fungsi pokok dari penerimaan dinas-dinas daerah (kecuali dinas pendapatan daerah) pada umumnya untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah yang bersifat pembinaan atau bimbingan kepada masyarakat.. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa, dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan lainnya (Hirawan, 1987).



III. KERANGKA TEORITIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dalam memenuhi kebutuhan sosial, material maupun spiritual. Pemenuhan kebutuhan tersebut meliputi rasa keselamatan, kesucilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan masyarakat mengadakan usaha-usaha agar kesejahteraannya terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat juga merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah dapat di lihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita (Sunarti, 2012).

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas ekonomi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Nilai PDRB per kapita di Kabupaten Nganjuk melihat dari nilai PDRB atas dasar harga konstan dan jumlah penduduk pada tahun 2002-2018.

Selanjutnya beberapa indikator penunjang kesejahteraan masyarakat yang digunakan yakni indikator taraf dan pola konsumsi untuk melihat PDRB. Kemudian untuk melihat dari segi sumber daya manusia menggunakan indikator ketenagakerjaan berupa nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan indikator Indeks Pembangunan Manusia (Badan Pusat Statistik, 2018). Kemudian dalam pembentukan PDRB menurut penggunaannya tersusun dari konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, serta ekspor dan impor. Pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventori sejatinya didasarkan oleh nilai investasi yang berada disuatu wilayah tersebut. Sedangkan konsumsi pemerintah didasarkan oleh seberapa besar penerimaan daerah yang diperoleh dalam mewujudkan kemandirian daerah. Penerimaan suatu daerah dapat digambarkan dengan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Badan Pusat Statistik, 2010).

Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nganjuk melihat dari persentase jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja.



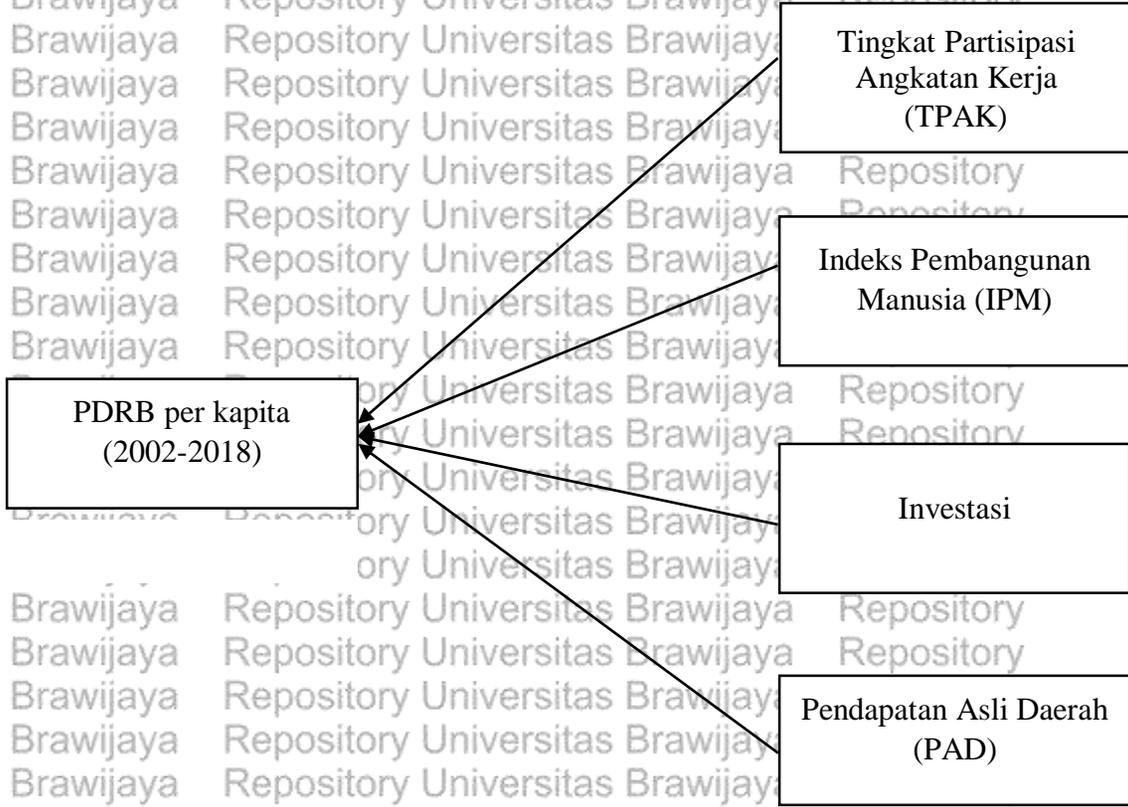
Angkatan kerja menggambarkan penduduk yang aktif dalam menciptakan usaha-usaha di dunia kerja. Menurut Simanjuntak (1998), semakin besar nilai TPAK maka semakin besar jumlah angkatan kerja di suatu wilayah. Oleh karena itu, tingginya nilai TPAK akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kondisi sumber daya manusia. Pembangunan manusia juga menggambarkan kualitas manusia yang berada di suatu wilayah tersebut. Nilai IPM di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran periode tahun 2002-2018.

Investasi memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa pada gilirannya akan menyerap angkatan kerja. Tenaga kerja selanjutnya akan memperoleh upah dan peningkatan daya beli. Oleh karena itu, semakin banyak investasi yang digunakan untuk melakukan proses produksi barang dan jasa serta tenaga kerja dapat diserap lebih banyak juga sehingga terjadi pemerataan pendapatan perkapita (Sukirno, 2004).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dalam melihat pengaruh sumber daya manusia terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Nganjuk. Adanya penelitian ini diharapkan pemerintahan terkait dapat menerapkan kebijakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari segi tenaga kerja, pembangunan manusia, investasi dan pendapatan daerah.

Keterangan:
→
Alur analisis



Gambar 2. Skema kerangka pemikiran pengaruh TPAK, IPM, Investasi dan PAD Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Nganjuk



3.2 Hipotesis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hukom (2014) mengenai hubungan ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat dan Pebrina (2018), mengenai pengaruh investasi, pendapatan asli daerah dan tenaga kerja terhadap PDRB, maka dalam penelitian ini dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

- 1) $H_0 = 0$, tidak ada pengaruh signifikan dari variabel bebas (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita (Y).
- 2) $H_a \neq 0$, ada pengaruh signifikan dari variabel bebas (X) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita (Y).

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$H_a (X_1)$: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018.

$H_a (X_2)$: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018.

$H_a (X_3)$: Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018.

$H_a (X_4)$: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. Pengukuran PDRB per kapita, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Konsep	Variabel	Definisi Operasional Variabel	Pengukuran Variabel
Pembangunan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita	Pendapatan masyarakat secara general yang dilihat dari PDRB dibagi jumlah penduduk di suatu wilayah	Rupiah (Rp)
Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	TPAK merupakan persentase dari perbandingan angkatan kerja dan penduduk usia kerja di suatu wilayah	Persen (%)
Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan manusia dipengaruhi oleh indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.	Persen (%)
Investasi	Nilai Investasi	Investasi dapat dilihat dari total keseluruhan nilai investasi yang dilakukan bersama industri kecil, sedang maupun besar di suatu wilayah.	Rupiah (Rp)
Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Semua penerimaan daerah yang terdiri dari pajak daerah	Rupiah (Rp)

IV. METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang ditinjau dari jenis data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yakni dengan melihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun dalam penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (X_1), Indeks Pembangunan Manusia (X_2), investasi (X_3) dan Pendapatan Asli Daerah (X_4) terhadap variabel terikat PDRB ADHK per kapita (Y). Menurut Arikunto (2006) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran data dan penampilan hasilnya.

4.2 Penentuan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk dipilih karena memiliki nilai PDRB ADHK yang rendah yakni urutan ke 5 dari 7 Kabupaten/kota se Karisidenan Kediri Tahun 2018. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB ADHK per kapita di Kabupaten Nganjuk.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan runtut waktu (*time series*) 17 tahun yaitu dimulai tahun 2002 hingga tahun 2018. Penentuan runtut waktu mulai tahun 2002 dikarenakan pada tahun tersebut terdapat peningkatan jumlah penduduk yang tinggi yakni sejumlah 1.019.329 jiwa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil informasi atau data melalui dokumen-dokumen dan arsip instansi-instansi terkait yaitu bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Unit Usaha Mikro serta Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Data-data yang diperoleh terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita,



struktur tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), angkatan kerja, jumlah penduduk usia kerja, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.4 Metode Analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

4.4.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan hasil struktur tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk.

4.4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Nganjuk dengan data *time series* tahun 2002-2018. Penelitian ini menggunakan analisis persamaan regresi linier berganda bantuan *Software Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows*. Model persamaan regresi linier berganda yang digunakan yaitu:

$$\text{PDRB ADHK per kapita}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{TPAK}_t + \beta_2 \text{IPM}_t + \beta_3 I_t + \beta_4 \text{PAD}_t + e$$

Dimana:

$\text{PDRB ADHK per kapita}_t$ = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita (rupiah)

TPAK_t = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (persen)

IPM_t = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (persen)

I_t = Investasi (rupiah)

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah (PAD)



1) Uji Asumsi Klasik

Syarat-syarat yang harus dipenuhi di model regresi linier berganda agar valid sebagai alat penduga yaitu menggunakan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik merupakan suatu keharusan didalam analisis data untuk memperoleh hasil yang bersifat BLUE (*Best, Linier, Unbiased, Estimated*) artinya koefisien regresi pada persamaan tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berarti (Santoso, 2002).

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residu memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi residu berdistribusi normal atau tidak yaitu analisis grafik dan uji statistik.

Pertama, analisis grafik jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola terdistribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Kedua, uji statistik non parametric Kolmogorov-Smirnov ($K-S$) dilihat dari nilai $Asymp. Sig > 0,05$ (Ghozali, 2011).

b. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Oleh karena itu, untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0,10$ (Ghozali, 2011).

2) Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang dinyatakan dengan R^2 berguna untuk mengetahui proporsi keragaman total dalam variabel terikat (Y) adalah PDRB per kapita dengan satuan rupiah (Rp) yang dapat dijelaskan atau diterangkan oleh variabel-variabel bebas (X) meliputi TPAK (X_1) dan IPM (X_2) yang ada dalam model persamaan regresi linier berganda secara bersama-sama (Ghozali, 2011).



b. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji F berdasarkan nilai F hitung dan F tabel :

1. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel bebas secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat
2. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel bebas secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji F berdasarkan nilai signifikansi:

- a) H_0 diterima dan H_1 ditolak jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau jika nilai Sig $> 0,05$
- b) H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai Sig $< 0,05$

(Gujarati, 2003)

c. Uji T

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat. Oleh sebab itu, uji T dapat digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel terikat secara nyata. Cara melakukan uji T pada hasil output uji ini adalah dengan membandingkan nilai statistic T dengan tabel. Dasar pengambilan keputusan dalam uji T berdasarkan nilai T_{hitung} dan T_{tabel} :

1. Jika nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Jika nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

Dasar pengambilan keputusan dalam uji T berdasarkan nilai signifikansi:

- a. H_0 diterima dan H_1 ditolak jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau jika nilai Sig $> 0,05$
- b. H_0 ditolak dan H_1 diterima jika nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau jika nilai Sig $< 0,05$



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Profil Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat dari wilayah Provinsi Jawa Timur pada koordinat $111^{\circ} 50'$ – $112^{\circ} 13'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 20'$ – $7^{\circ} 50'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 128.897,146 Ha dengan batas-batas wilayah administrasi:

Sebelah utara : Kabupaten Bojonegoro.

Sebelah selatan : Kabupaten Kediri dan Tulungagung.

Sebelah timur : Kabupaten Jombang dan Kediri.

Sebelah barat : Kabupaten Ponorogo dan Madiun.

5.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Nganjuk tersebar ke dalam 3 wilayah dataran yaitu 110.433,93 ha (85,68 persen) terletak di dataran rendah, 11.577,67 ha (8,98 persen) di dataran sedang dan 6.885,55 ha (5,34 persen) merupakan dataran tinggi. Wilayah tersebut tersebar dari selatan yaitu Gunung Wilis bagian utara hingga kaki Gunung Kendeng bagian selatan. Wilayah Kecamatan di kaki Gunung Wilis diantaranya Kecamatan Ngetos, Sawahan, Wilangan, sebagian Kecamatan Loceret dan Pace. Sedangkan di bagian utara yaitu di kaki Gunung Kendeng adalah Kecamatan Ngluyu. Geografis Kabupaten Nganjuk berada pada titik tengah persimpangan jalan Provinsi Jawa Timur. Keberadaannya menjadi penghubung antara Ibukota Provinsi Surabaya dengan wilayah Jawa Timur bagian barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sektor jasa dan perdagangan yang besar sebagai daerah penghubung perdagangan. Selain itu, kondisi geografis yang luas dengan jenis wilayah yang beragam, maka jumlah kecamatan juga cukup banyak dan variatif.

5.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk berjumlah 1.019.329 jiwa pada tahun 2002 dan mengalami peningkatan menjadi 1.051.900 jiwa pada tahun 2018. Perhitungan jumlah penduduk sendiri juga mengalami perubahan dimana pada tahun 2010, Badan Pusat Statistik menggunakan data SUSENAS untuk menghitung jumlah



penduduk di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan data tersebut berarti pertumbuhan Penduduk selama 17 tahun memiliki rata-rata peningkatan sebesar 0.21 persen sebagaimana tabel berikut

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018

Tahun	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat Pertumbuhan penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
2002	503265	516064	1019329	0,53	833
2003	505899	518729	1024691	0,26	837
2004	507105	520266	1027371	0,90	839
2005	511315	525283	1036598	0,67	847
2006	514817	528686	1043503	1,92	852
2007	526337	537218	1063555	0,54	869
2008	529408	539891	1069299	6,24	873
2009	505265	511128	1002530	1,64	819
2010	505687	513332	1019019	0,50	832
2011	508923	515182	1024105	0,47	836
2012	508567	516946	1028914	0,46	840
2013	513398	520199	1033597	0,40	844
2014	515597	522126	1037723	0,38	848
2015	517712	524004	1041716	0,35	851
2016	519717	525658	1045375	0,33	854
2017	521388	527411	1048799	0,33	857
2018	522970	528930	1051900	-	859

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2019, Diolah

Menurut Arsyad (2004), menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk suatu wilayah akan mempengaruhi pertambahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh sebab itu perlu adanya kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja.

Kemudian berdasarkan Tabel 4. jumlah penduduk di Kabupaten Nganjuk menurut jenis kelamin secara bertahap mengalami peningkatan. Jumlah penduduk laki-laki mengalami peningkatan dari 503.265 jiwa pada tahun 2002 menjadi 522.970 jiwa pada tahun 2018. Peningkatan jumlah penduduk juga dialami oleh penduduk berjenis kelamin perempuan dengan jumlah mencapai 516.064 jiwa pada tahun 2002 menjadi 528.930 jiwa pada tahun 2018. Peningkatan tersebut juga memicu adanya kenaikan dari kepadatan penduduk yang berada di kabupaten nganjuk yakni dari 832 Jiwa/km²



menjadi 859 jiwa/km². Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 km² luas wilayah di Kabupaten Nganjuk dihuni oleh 832 jiwa di tahun 2002 dan meningkat menjadi 859 jiwa pada tahun 2018.

5.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Visi merupakan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh suatu pemerintah daerah. Visi digunakan sebagai arah dan tujuan dalam mengelola berbagai potensi daerah oleh pemerintah daerah yang dibangun secara terpadu, sinergis dan produktif. Adapun visi Kabupaten Nganjuk yang disusun dalam rangka mencapai tujuan dalam masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk terpilih tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTO KUTHO)”

Kemudian misi merupakan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kabupaten Nganjuk menetapkan misi untuk mencapai visi dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban. Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi “BERMARTABAT”, yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang sejahtera melalui: Peningkatan kualitas keimanan, ketaqwaan, toleransi dan kerukunan umat beragama, peningkatan kemampuan fasilitasi layanan keagamaan dan peningkatan kualitas ketentraman, ketertiban, kenyamanan lingkungan
- b. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel. Penjabaran misi ini juga berasal dari pokok visi “Bermatabat”, yakni pemerintah Kabupaten Nganjuk ingin menciptakan instansi pemerintahan yang bermanfaat.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi “MAJU”, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk
- d. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi



tepat guna. Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi “MAJU”, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

e. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata. Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi “BERMARTABAT”, yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang kaya akan keragaman budaya.

f. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana. Misi ini adalah penjabaran dari pokok visi “MAJU”, yakni untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang maju dalam hal infrastruktur publik.

5.2 Struktur Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang memiliki usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa.

Sedangkan jumlah pencari kerja merupakan jumlah penduduk usia kerja yang mencari kerja maupun membuka peluang pekerjaan baru berdasarkan lowongan pekerjaan yang disediakan. Adapun jumlah tenaga kerja, pencari kerja dan lowongan kerja di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5. Jumlah Pencari Kerja, Tenaga Kerja dan Lowongan Kerja di Kabupaten Nganjuk.

Tahun	Tenaga Kerja (Jiwa)	Pencari Kerja (Jiwa)	Lowongan Kerja (Unit)
2002	501.774	4.019	4.333
2003	480.622	5.634	3.915
2004	563.760	8.139	2.930
2005	470.026	11.636	2.053
2006	525.370	5.533	5.115
2007	520.022	3.448	3.366
2008	517.169	11.179	3.510
2009	540.873	5.681	3.309
2010	485.507	4.240	1.243
2011	480.019	1.989	1.034
2012	508.859	1.904	903
2013	523.384	1.637	479
2014	513.031	2.493	1.075
2015	506.132	2.367	617
2016	506.221	5.221	6.486



Tahun	Tenaga Kerja (Jiwa)	Pencari Kerja (Jiwa)	Lowongan Kerja (Unit)
2017	487.899	5.221	814
2018	541.279	2.395	691

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2019, Diolah

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh bahwa jumlah tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk mengalami nilai yang berfluktuatif. Jumlah tenaga kerja tertinggi terdapat pada tahun 2018 yakni sebesar 541.279 jiwa. Sedangkan jumlah tenaga kerja terendah terdapat pada tahun 2011 yakni sebesar 480.019 jiwa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk (2019), sektor ekonomi yang memiliki kontribusi tertinggi pada tahun 2018 yakni pada sektor pertanian sebesar 222.127 jiwa. Adapun dalam melihat tingkat penyerapan tenaga kerja, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan data nilai tambah pertanian. Hal tersebut menggambarkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam memberikan peluang pekerjaan yang besar dibandingkan sektor lainnya. Selanjutnya menurut Mulyadi (2003), penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang dapat memproduksi barang atau jasa. Sedangkan pada Tabel 6, diperoleh bahwa penduduk usia kerja yang termasuk golongan pencari kerja memperoleh jumlah tertinggi pada tahun 2005 yakni sebesar 11.636 jiwa.

Tingginya jumlah penduduk pencari kerja menggambarkan bahwa di daerah tersebut memiliki penduduk usia produktif yang banyak sehingga perlu adanya lowongan pekerjaan untuk menjalankan roda perekonomian. Kemudian menurut Sukirno (2004), menjelaskan bahwa pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dibandingkan jumlah pencari kerja dapat menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran terbuka yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan diperoleh hasil bahwa lowongan pekerjaan di Kabupaten Nganjuk tahun 2002-2018 memiliki rata-rata sejumlah 2.463 unit. Hal tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata pencari kerja tahun 2002-2018 yakni sebanyak 4.866 jiwa. Lowongan pekerjaan menggambarkan seberapa banyak peluang penduduk produktif dalam melakukan kegiatan ekonominya. Adapun penduduk usia di atas 15 tahun juga dibagi berdasarkan jenis kegiatan utamanya sebagai berikut:



Tabel 6. Tabel Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Berdasarkan Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Nganjuk

Jenis Kegiatan	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018
Bekerja	518.150	501.588	515.153	513.031	506.132	487.899	541.279
Menganggur	25.709	22.114	25.710	20.976	10.841	16.260	14.662
Sekolah	47.028	52.740	43.830	48.406	57.837	62.313	48.631
Mengurus Rumah Tangga	144.140	159.328	144.231	173.745	184.825	207.256	186.285
Lainnya	36.580	39.910	47.018	38.820	42.109	39.738	27.787

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2019, Diolah

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh data bahwa penduduk usia diatas 15 tahun di Kabupaten Nganjuk umumnya memilih kegiatan utama yakni bekerja. Hal tersebut terlihat dari data perbandingan jumlah penduduk berdasarkan masing-masing jenis kegiatan utamanya. Kegiatan yang memiliki jumlah penduduk tinggi kedua yakni sebagai pengurus rumah tangga. Tinggi nya jumlah penduduk bekerja dibandingkan kegiatan lain menggambarkan bahwa penduduk di Kabupaten Nganjuk umumnya memilih untuk menjalankan kegiatan ekonomi sehingga diharapkan dapat membantu kenaikan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Mulyadi (2003), menjelaskan bahwa alokasi sumber daya manusia menjadi awal mula berjalannya suatu perekonomian. Hal ini dikarenakan manusia dianggap sebagai roda kehidupan yang mengolah sumber daya alam menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Kemudian dari aktivitas tersebut akan timbul akumulasi modal (fisik) yang kelak akan diperlukan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Adapun jumlah pencari kerja di Kabupaten Nganjuk berdasarkan pendidikan dapat dilihat melalui berikut

Tabel 7. Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2013

Tingkat Pendidikan Terakhir	2005	2008	2009	2010	2011	2012
Tidak Tamat SD	-	-	-	-	1	-
SD Sederajat	992	36	902	36	72	31
SMP Sederajat	1.497	180	1.222	180	358	563



Tingkat Pendidikan Terakhir	2005	2008	2009	2010	2011	2012
SMA Sederajat	6.403	1.488	1.631	1.488	1.244	941
Sarjana muda	1.694	701	715	701	113	121
Sarjana	1.050	1.818	715	1.818	199	244
S-2	-	17	6	17-	2	4

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2019, Diolah

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dapat menambah ilmu untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan mengambil keputusan dalam pekerjaan. Semakin tinggi tamatan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan dan kesempatan untuk bekerja (Merizal, 2008). Berdasarkan Tabel 7, diperoleh bahwa data pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan hanya di publikasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk dengan tahun tertua yakni 2005. Kemudian didapatkan juga bahwa jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Nganjuk umumnya memiliki jumlah tertinggi pada tingkat pendidikan SMA Sederajat. Sedangkan tingkat pendidikan tertinggi kedua berada pada tingkat Sarjana.

Tingkat pendidikan terakhir akan menentukan tingkat pekerjaan yang dapat diampu oleh penduduk usia kerja. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan fokus anak muda ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Menurut Todaro (2000), pendidikan berperan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan apabila seseorang memiliki tingkat pendidikan atau keikutsertaan terhadap pelatihan yang tinggi maka keterampilan yang dimiliki akan tinggi. Kemudian jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2018 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 8. Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2013-2018

Tingkat Pendidikan Terakhir	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tidak Tamat SD	-	-	-	-	1	-
SD sederajat	31	99	47	72	108	37



Tingkat Pendidikan Terakhir	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SMP Sederajat	371	466	388	300	429	128
SMA Sederajat	570	1.049	1.499	236	266	374
Sarjana Muda	154	361	143	6	8	179
Sarjana	506	518	284	2	2	388
S-2	5	-	6	-	-	14

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2019, Diolah

Selanjutnya berdasarkan Tabel 8, diperoleh hasil bahwa jumlah pencari kerja tahun 2013-2018 di Kabupaten Nganjuk sedikit mengalami perubahan jumlah nilai yang diperoleh. Hal tersebut terlihat dari hasil perhitungan yang umumnya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian dijelaskan juga bahwa penduduk pencari kerja tertinggi yakni tetap penduduk berpendidikan akhir tingkat SMA Sederajat dan disusul oleh pendidikan akhir sarjana. Adanya penurunan tingkat pendidikan terakhir pencari kerja yakni SMA sederajat pada tahun 2016-2018 juga sejalan dengan peningkatan data Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Nganjuk tahun 2016 sebanyak 12,7% untuk laki-laki dan 13,12% untuk perempuan (Badan Pusat Statistik, 2018)

5.3 Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5.3.1 Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dijadikan faktor positif bagi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (Todaro, 2006). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nganjuk menggambarkan berapa persentase partisipasi para angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut. Adapun nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dapat dilihat melalui Tabel 2 berikut.

Tabel 9. Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nganjuk periode tahun 2002-2018.

Tahun	TPAK (%)
2002	68,65
2003	72,61
2004	68,57



Tahun	TPAK (%)
2005	67,83
2006	67,63
2007	68,86
2008	68,14
2009	69,27
2010	65,66
2011	65,55
2012	67,57
2013	69,64
2014	67,17
2015	64,48
2016	63,14
2017	61,98
2018	67,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 9, dijelaskan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nganjuk mengalami nilai yang berfluktuatif sejak tahun 2002 hingga 2018. Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan terbanyak pada tahun 2010 yakni sebesar 3,61 persen dengan jumlah angkatan kerja sebesar 503,871 jiwa. Kemudian peningkatan nilai TPAK terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,98 persen dengan jumlah angkatan kerja sebesar 555 941 jiwa. Sejak tahun 2002 hingga 2018, tingkat partisipasi angkatan kerja lebih banyak mengalami penurunan dibandingkan peningkatan. Selama kurun waktu 17 tahun, nilai TPAK di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan sebanyak 9 kali..

Hal ini sejalan dengan pendapat Todaro (2006), dimana peningkatan tenaga kerja umumnya akan meningkatkan jumlah produksi dan mempengaruhi ukuran produk domestik regional bruto di suatu daerah.

5.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat pembangunan atau kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah tersebut. Nilai Indeks Pembangunan Manusia dilihat melalui 3 indikator yakni kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak (Badan Pusat Statistik,



2015). Adapun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nganjuk di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nganjuk periode tahun 2002-2018

Tahun	IPM (%)
2002	64,7
2003	65,8
2004	67,16
2005	67,51
2006	68,47
2007	69,25
2008	69,73
2009	70,27
2010	65,6
2011	66,58
2012	68,07
2013	68,98
2014	69,59
2015	69,9
2016	70,5
2017	70,69
2018	71,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 10, diperoleh hasil bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada dalam kategori sedang yakni kisaran $50 \leq \text{IPM} < 80$, adapun IPM dapat dikatakan tinggi apabila memperoleh hasil $\text{IPM} \geq 80$ (UNDP, 1993). Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Nganjuk hanya mengalami sekali penurunan pada tahun 2010 yakni 4,67 persen lebih kecil dibandingkan tahun 2009. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh nilai kesehatan, pengetahuan dan strandar hidup layak yang dijadikan indikator dalam melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya pada tahun 2014 dimulai metode baru yakni mengubah penilaian dimensi pengetahuan dari Angka Melek Huruf (AMH) dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). Adanya pergantian indikator dalam melihat nilai Indeks Pembangunan Manusia oleh Badan Pusat Statistik tetap membuat nilai IPM di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan. Oleh karena itu, Indeks



Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nganjuk dapat menggambarkan bagaimana kualitas sumber daya manusia yang berada dalam kategori sedang. Menurut Pudjiyanto *et al* (2015), menjelaskan bahwa pembangunan manusia umumnya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manusia di segi kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak diperlukan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu daerah.

5.3.3 Investasi

Salah satu penunjang pembangunan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, pemerintah daerah perlu menggunakan investasi (Mankiw, 2003). Hal ini dikarenakan investasi bisa dijadikan modal bagi pemilik usaha dalam meningkatkan kapasitas produksi maupun teknologi yang dimilikinya. Adapun nilai Investasi di Kabupaten Nganjuk dijabarkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 11. Investasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018

Tahun	Investasi (Rp)
2002	1.681.836
2003	1.696.936
2004	10.251.473
2005	11.873.285
2006	14.408.634
2007	17.001.634
2008	50.960.793
2009	56.947.704
2010	77.972.966
2011	77.303.572
2012	81.168.751
2013	84.618.275
2014	89.319.000
2015	89.898.923
2016	91.538.245
2017	99.776.687
2018	101.389.463

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2019 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 11, didapatkan bahwa Investasi di Kabupaten Nganjuk umumnya di bagi menjadi 2 yakni berdasarkan industri kecil formal menurut kelompok dan industri kecil non formal menurut kelompok. Menurut Mulyadi (2003), sektor



informal adalah unit-unit usaha umumnya berupa padat karya yang tidak menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal umumnya merupakan sektor ekonomi yang memiliki proteksi resmi. Industri-industri tersebut terdiri dari industri hasil pertanian dan kehutanan, industri aneka dan industri logam, mesin dan kimia. Kemudian nilai investasi di Kabupaten Nganjuk periode tahun 2002-2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya yakni dari Rp. 1.681.836 Juta menjadi Rp 101.389.463 Juta. Hal tersebut menggambarkan bahwa para investor setiap tahunnya mulai menambah maupun memulai melakukan investasi di Kabupaten Nganjuk. Menurut Sukirno (2007) menjelaskan bahwa berdasarkan teori Harrod-Domar, investasi berperan sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suaru perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa.

5.3.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber ekonomi asli daerah yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan daerah (Halim, 2012). Menurut pasal 6 Undang-Undang Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah dan penerimaan dinas-dinas daerah (kecuali dinas pendapatan daerah. Adapun nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 12. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nganjuk periode tahun 2002-2018

Tahun	PAD (Rp)
2002	24.438
2003	36.773
2004	35.293
2005	40.295
2006	52.034
2007	53.168
2008	58.812
2009	71.274
2010	79.507
2011	94.283
2012	125.215
2013	153.142



Tahun	PAD (Rp)
2014	225.958
2015	287.881
2016	232.045
2017	332.495
2018	359.593

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2005-2019. (Diolah)

Berdasarkan Tabel 12, didapatkan hasil bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat pada periode tahun 2002-2018.

Peningkatan tersebut terbukti dari nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 24.438 Juta pada tahun 2002 menjadi Rp 359.593 Juta pada tahun 2018. Selama periode 17 tahun tersebut terdapat 2 kali penurunan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut menggambarkan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki pendapatan daerah yang cenderung meningkat sehingga dapat mempengaruhi perekonomian daerah. Nilai peningkatan PAD harus sejalan dengan penggunaannya yang tepat sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah. Menurut Sidik (2002), keberhasilan dari kenaikan PAD tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima namun juga dari peranannya dalam mengatur perekonomian daerah. Hal tersebut nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dan mencerminkan perkembangan perekonomian daerah.

5.4. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB per kapita

5.4.1 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. Adapun dalam periode tahun 2002 hingga 2018, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang digunakan yakni berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2000 dan 2010. Hal tersebut dikarenakan ada perubahan dasar harga konstan yang dilakukan setiap 10 tahun.



Kemudian struktur perekonomian suatu daerah umumnya dapat dilihat dari komposisi produk regional menurut sektor-sektor perekonomian (Nachrowi, 2004).

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga yang Konstan (PDRB ADHK) di Kabupaten Nganjuk tahun 2002 – 2018 mengalami nilai yang terus meningkat.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan setiap tahunnya. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) di Kabupaten Nganjuk yakni dari Rp 3.181.608 Juta pada tahun 2002 menjadi Rp 17.374.160 Juta pada tahun 2018. Peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) paling banyak dikontribusi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni mencapai Rp 4.861.809 juta pada tahun 2018. Hal tersebut digambarkan oleh banyaknya areal persawahan serta perikanan yang ada di Kabupaten Nganjuk (Badan Pusat Statistik 2005-2019, Diolah).

Sedangkan jika dilihat bersamaan dengan kabupaten/kota lain khususnya di Karisidenan Kediri, nilai PDRB ADHK Kabupaten Nganjuk masih tergolong rendah.

Pada Lampiran 12, diperoleh data bahwa nilai PDRB ADHK Kabupaten Nganjuk berada dibawah Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar. Hal ini terlihat dari urutan ke 5 dari 7 kabupaten/kota di Karisidenan Kediri yang menggambarkan bahwa Kabupaten Nganjuk masih belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian daerahnya. Semakin tinggi sektor ekonomi yang berkontribusi maka sektor tersebut memiliki peran yang besar dalam meningkatkan perekonomian (Badan Pusat Statistik, 2005-2019 Diolah).

Selanjutnya kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB ADHK di Kabupaten Nganjuk tahun 2002 hingga 2018 dibagi menjadi 2 yakni berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2002 dan 2010. Berdasarkan ADHK tahun 2002 dapat diperoleh bahwa sektor pertanian memiliki kontribusi yang tinggi pada tahun 2002 yakni mencapai 35,69 persen serta disusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 33,81 persen. Kemudian selama 6 tahun berikutnya yakni tahun 2003 hingga 2008, sektor ekonomi yang berkontribusi tertinggi yakni pada sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mencapai nilai 38,59 persen pada tahun 2008. Kenaikan di sektor tersebut didukung dengan tingginya nilai kontribusi sektor perdagangan



terhadap PDRB yakni sebesar Rp 1.659.878,58 Juta pada tahun 2008. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian sebesar Rp 1.418.153,4 Juta pada tahun 2008. Sedangkan pada tahun 2009, persentase kontribusi sektor ekonomi tertinggi kembali kepada sektor pertanian sebesar 36,46 persen dimana nilai tersebut 6,43 persen lebih tinggi dibandingkan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Maka dapat digambarkan bahwa berdasarkan PDRB ADHK tahun 2002, kontribusi sektor yang lebih banyak berperan terdapat pada sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Kemudian berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, sektor pertanian menjadi sektor ekonomi yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap PDRB dari tahun 2010 hingga 2018. Sektor pertanian berkontribusi sebesar 35,85 persen pada tahun 2010 dan 27,98 persen pada tahun 2018. Penurunan kontribusi tersebut disebabkan oleh kenaikan kontribusi di sektor perdagangan besar dan eceran dari 15,97 persen tahun 2010 menjadi 20,35 persen tahun 2018. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi terkecil pada PDRB di Kabupaten Nganjuk tahun 2010-2018 adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas yakni mencapai 0,05 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2012 yakni 0,06 persen. Hal tersebut menggambarkan bahwa sektor pertanian dan perdagangan memiliki pengaruh yang tinggi dalam meningkatkan nilai PDRB di Kabupaten Nganjuk tahun 2010-2018.

5.4.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Model regresi linier berganda yang lolos uji asumsi klasik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Distribusi normal sebuah data dapat dilihat menggunakan analisis grafik histogram. Berdasarkan Lampiran 13, diperoleh kesimpulan bahwa grafik histogram menunjukkan pola distribusi yang mendekati normal. Metode lain yang dapat digunakan dalam melihat distribusi data secara normal yakni dengan melihat *normal probability plot*. Metode ini menampilkan grafik normal plot dimana titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sebagaimana ditunjukkan pada Lampiran 13.



Berdasarkan grafik histogram dan grafik normal plot menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai pada penelitian ini karena sebaran titik-titik disekitar garis diagonal yang berarti data tersebut berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas. Kemudian untuk menentukan data terdistribusi secara normal melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Pengujian terhadap normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ditunjukkan pada Lampiran 13, dimana data variabel mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,125. Hasil tersebut menjelaskan bahwa tingkat signifikansi yang diperoleh yakni diatas 5 persen atau 0,05. Oleh sebab itu, data pada semua variabel yang digunakan terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji untuk mengetahui tidak adanya hubungan atau korelasi antara variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, yakni variabel ln TPAK (X_1), ln IPM (X_2), ln Investasi (X_3) dan ln PAD (X_4) dalam model regresinya dengan cara melihat nilai VIF (*Varians Inflation Factor*). Hasil uji multikolinearitas ini dapat dilihat pada Lampiran 13. Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan pada model regresi dengan lebih dari satu variabel independen (regresi berganda) dimana terjadi korelasi yang kuat antar-variabel independen (Nawari, 2010).

Berdasarkan hasil yang terdapat pada Lampiran 13, diperoleh hasil bahwa nilai VIF variabel bebas penelitian ini adalah TPAK (1,747), IPM (2,229), investasi (3,426) dan PAD (4,202). Menurut Imam Ghozali (2011), nilai VIF < 10 menggambarkan bahwa variabel independen tidak mengalami multikolinearitas. Berdasarkan data yang ada, variabel bebas dalam model regresi penelitian ini tidak mengalami multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Data yang tidak mengalami heteroskedastisitas melainkan terjadi homokedastis merupakan data yang akan lolos uji asumsi klasik. Homokedastis terjadi apabila *variancei* dari nilai *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain konstan. Cara mengetahui terjadinya heteroskedastisitas antar nilai residual dari observasi dapat dilakukan dengan melihat grafik *scatterplot*, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titiknya menyebar diatas



dan dibawah sumbu 0 (nol) pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada suatu model regresi. Berdasarkan Grafik *scatterplot* pada Lampiran 13, menjelaskan bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola tertentu. Oleh karena itu disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi pengaruh PDRB per kapita berdasarkan variabel independen yaitu, TPAK, IPM, Investasi, dan PAD.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$. Kemudian untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi atau tidak dalam suatu model regresi dilakukan dengan melihat nilai statistik Durbin-Watson (DW). Menurut Herjanto (2008), Angka D-W diantara 1,5 sampai dengan 2,5 berarti data tersebut tidak mengalami autokorelasi. Berdasarkan hasil yang terdapat di Lampiran 10, didapatkan bahwa hasil hitung Durbin-Watson (D.W) sebesar 2,042. Maka dari itu diperoleh bahwa data tidak mengalami autokorelasi.

5.4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data menggunakan model persamaan regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara suatu variabel dependen dan variabel lainnya. Model persamaan regresi linier berganda disusun untuk mengetahui pengaruh antara TPAK, IPM, Investasi dan PAD (variabel independen) terhadap PDRB ADHK periode tahun 2002-2018 di Kabupaten Nganjuk (variabel dependen) secara bersama-sama adalah $\ln \text{PDRB ADHK per kapita}_t = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{TPAK}_t + \beta_2 \ln \text{IPM}_t + \beta_3 \ln I_t + \beta_4 \ln \text{PAD}_t + e$. Analisis pengaruh $\ln \text{TPAK}$ (X1), $\ln \text{IPM}$ (X2), $\ln \text{Investasi}$ (X3) dan $\ln \text{PAD}$ (X4) terhadap $\ln \text{PDRB ADHK}$ (Y) menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis data menggunakan SPSS diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut.

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Bebas	Koefisien Regresi (β)	Keterangan
Konstanta	14,208	Berpengaruh positif
$\ln \text{TPAK}$ (X1)	0,565	Berpengaruh positif
$\ln \text{IPM}$ (X2)	-5,839	Berpengaruh negatif
$\ln \text{Investasi}$ (X3)	0,062	Berpengaruh positif
$\ln \text{PAD}$ (X4)	0,821	Berpengaruh positif



Sumber: Output SPSS 22.0, data diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada Tabel 13, diperoleh koefisien untuk variabel bebas $\ln TPAK_t = 0,565$, $\ln IPM_t = -5,839$, $\ln I_t = 0,062$, $\ln PAD_t = 0,821$ dan konstanta terbesar 14,208 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah

$$\ln PDRB \text{ ADHK per kapita}_t = 14,208 + 0,565 \ln TPAK_t - 5,839 \ln IPM_t + 0,062 \ln I_t + 0,821 \ln PAD_t$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan:

- 1) Nilai konstanta (Y) sebesar 14,208. Jika variabel independen ($\ln TPAK$, $\ln IPM$, $\ln Investasi$ dan $\ln PAD$) sama dengan 0 maka variabel dependen ($\ln PDRB \text{ ADHK}$ per kapita) akan mengalami penambahan sebesar Rp 14.208 Juta per tahun.
- 2) Koefisien regresi X1 (TPAK) dari perhitungan linier berganda didapat nilai *coefficients* (b_1) = 0,565. Hal ini berarti setiap penambahan 1 persen variabel independen (TPAK) maka akan menambah variabel dependen (PDRB ADHK) sebesar Rp 0,565 Juta/tahun
- 3) Koefisien regresi X2 (IPM) dari perhitungan linier berganda didapat nilai *coefficients* (b_2) = -5,839. Hal ini berarti setiap penambahan 1 persen variabel independen (IPM) maka akan menurunkan variabel dependen (PDRB ADHK) sebesar Rp 5,839 Juta/tahun
- 4) Koefisien regresi X3 (Investasi) dari perhitungan linier berganda didapat nilai *coefficients* (b_3) = 0,062. Hal ini berarti setiap penambahan satuan (Rp/tahun) variabel independen (investasi) maka akan menambah variabel dependen (PDRB ADHK) sebesar Rp 6,787 Juta/tahun.
- 5) Koefisien regresi X4 (PAD) dari perhitungan linier berganda didapat nilai *coefficients* (b_4) = 0,821. Hal ini berarti Setiap penambahan satuan (Rp/tahun) variabel independen (PAD) maka akan menambah variabel dependen (PDRB ADHK) sebesar Rp 2,904 Juta/tahun.

5.4.4 Pengujian Hipotesis

- a. Koefisien Determinasi (R^2)



Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar nilai presentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat (Wicaksono, 2006). Hasil perhitungan didapatkan nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 14. Model Summary Data TPAK, IPM, Investasi dan PAD Terhadap PDRB Per Kapita di Kabupaten Nganjuk.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 ^a	.932	.909	.204056	2.041

a. Predictors: (Constant), LN_PAD, LN_TPAK, LN_IPM, LN_INVESTASI

b. Dependent Variable: LN_PDRB_PERKAPITA

Sumber: Output SPSS 22.0, data diolah, 2020

Uji koefisien determinasi adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan persentase keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model. Angka ini menggambarkan keeratan data dengan model yang dipasang. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 100 persen, nilai R^2 yang besar menunjukkan kaitan yang erat antara data dengan model tersebut (Saefuddin et al, 2009). Berdasarkan Tabel 14, dapat dilihat bahwa R^2 memiliki nilai sebesar 0,932. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel TPAK, IPM, Investasi dan PAD memiliki proporsi pengaruh terhadap PDRB ADHK per kapita di Kabupaten Nganjuk periode tahun 2002-2018 sebesar 93,2 persen. Sedangkan variabel lain yang tidak ada di model regresi linier ini memiliki pengaruh sebesar 6,8 persen.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F merupakan uji digunakan untuk mengetahui secara simultan pengaruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ln TPAK (X1), ln IPM (X2), ln Investasi (X3) dan ln PAD (X4) terhadap ln PDRB ADHK per kapita dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} . Nilai F_{tabel} didapatkan dari tabel nilai f dengan jumlah data sebanyak 17 (N=17) yaitu diketahui sebesar 3,18. Uji f adalah uji yang berfungsi untuk melihat uji hipotesis yang telah dilakukan secara bersama-sama terhadap koefisien regresi (Usman dan Nachrowi, 2004)



Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, maka model persamaan regresi linier berganda secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil pengolahan data pada Lampiran 14. diperoleh bahwa nilai $F_{hitung} = 41,088$ dan $F_{tabel} = 3,18$ maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga uji F pada analisis tersebut diterima (H_a diterima, H_0 ditolak). Kemudian diperoleh nilai $Prob > F = 0,000$ dan lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel independen (ln TPAK, ln IPM, ln Investasi, dan ln PAD) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (ln PDRB ADHK per kapita).

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat baik secara parsial. Hasil analisis uji hipotesis antara variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil Uji T

Variabel Bebas	Prob > t	α	Keterangan
Konstanta	0,255	0,05	Tidak Berpengaruh
Ln TPAK (X1)	0,743	0,05	Tidak Berpengaruh
Ln IPM (X2)	0,048	0,05	Berpengaruh Signifikan
Ln Investasi (X3)	0,386	0,05	Tidak Berpengaruh
Ln PAD (X4)	0,000	0,05	Berpengaruh Signifikan

Sumber : Output SPSS 22.0, data diolah, 2020

Jika signifikan < taraf signifikan yang digunakan maka dikatakan bahwa H_0 ditolak (Herjanto, 2008). Hasil Pengolahan data untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Terhadap PDRB ADHK per kapita.

Pada Tabel 15, didapatkan bahwa hasil $Prob > t$ lebih besar dibandingkan nilai $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel TPAK tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita. Arah koefisien regresinya positif sehingga H_0 ditolak dan disimpulkan bahwa variabel TPAK memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita. Hal ini tidak sependapat



dengan penelitian yang dilakukan oleh Hukom (2014), dimana TPAK memiliki pengaruh signifikan terhadap PDB di Indonesia.

Variabel TPAK menggambarkan seberapa besar presentase jumlah penduduk terhadap angkatan kerja yang berada di suatu daerah (Simanjuntak, 2005). Tingginya nilai TPAK dapat mencerminkan bahwa tenaga kerja di suatu wilayah tersebut memiliki jumlah yang banyak serta dapat meningkatkan barang atau jasa yang dihasilkan. Hasil yang menunjukkan bahwa variabel TPAK yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita menggambarkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk kurang berdampak dalam pertumbuhan nilai PDRB ADHK per kapita. Menurut Todaro (2006), TPAK dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peran tenaga kerja harus tetap diperhitungkan agar nantinya dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam peningkatan PDRB ADHK per kapita.

2) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap PDRB ADHK per kapita

Pada Tabel 15, dihasilkan bahwa variabel IPM memiliki nilai $\text{Prob} > t = 0,048$, maka nilai tersebut lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita. Arah koefisien regresi yang negative sehingga variabel IPM memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita di Kabupaten Nganjuk tahun 2002-2018. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Muqorrobin (2017), dimana diperoleh bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur.

Variabel IPM merupakan persentase dari indikator kesehatan, indikator pengetahuan dan indikator standar hidup layak masyarakat yang berada disuatu wilayah. Indikator-indikator tersebut nantinya akan menggambarkan bagaimana kualitas sumberdaya manusia yang tersedia (Badan Pusat Statistik, 2016). Hasil penelitian menyebutkan bahwa variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita di Kabupaten Nganjuk tahun 2002-2018. Menurut Aprillianti (2016) menjelaskan bahwa semakin memadainya pendidikan maka akan meningkatkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, tetap diperlukan pengembangan Indeks



Pembangunan Manusia (IPM) melalui indikator kesehatan, indikator pengetahuan dan indikator standar hidup layak agar nantinya IPM dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian daerah.

3) Pengaruh Investasi Terhadap PDRB ADHK per kapita

Pada Tabel 15, diperoleh hasil nilai $\text{Prob} > t = 0,386$ maka nilai tersebut lebih besar dibandingkan $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018.

Investasi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan industri kelompok kecil terus berkembang setiap tahunnya. Perkembangan nilai investasi juga mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan oleh pelaku usaha di bidang industri kelompok kecil tersebut.

Hal ini terlihat pada Lampiran 1 dimana nilai produksi bertambah dari Rp 13.816 Juta pada tahun 2002 menjadi Rp 189.059.040 Juta pada tahun 2018. Sedangkan berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh bahwa investasi di kabupaten nganjuk tidak sepenuhnya berpengaruh secara signifikan. Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiawati (2012), yang menyatakan bahwa investasi tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Timur.

4) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap PDRB ADHK per kapita

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kemandirian daerah sehingga diharapkan dapat tumbuh dari tahun ke tahun. Pada Tabel 15, dijelaskan bahwa variabel PAD memiliki nilai $\text{Prob} > t = 0,000$, maka nilai tersebut lebih kecil dibandingkan $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita. Arah koefisien regresi diperoleh positif sehingga H_0 diterima sehingga variabel PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita pada taraf kepercayaan 100 persen.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif serta signifikan menggambarkan bahwa variabel PAD memiliki peran penting dalam meningkatkan PDRB ADHK per kapita di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut sependapat dengan penelitian yang dilakukan Suwandika (2015), dimana penelitiannya menyimpulkan



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Struktur tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari jumlah tenaga kerja jumlah pencari kerja dan jumlah lowongan pekerjaan yang mengalami kenaikan berfluktuatif pada tahun 2002-2018. Kemudian diperoleh bahwa jumlah rata-rata tenaga kerja yakni 509.357 jiwa di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan diperoleh juga hasil bahwa lowongan pekerjaan di Kabupaten Nganjuk tahun 2002-2018 memiliki rata-rata sejumlah 2.463 unit. Hal tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata pencari kerja tahun 2002-2018 yakni sebanyak 4.866 jiwa. Mayoritas pencari kerja yang berpendidikan terakhir SMA Sederajat membuat tenaga kerja di bidang non formal lebih banyak dibandingkan di instansi/perusahaan formal.
2. Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Nganjuk mengalami nilai yang berfluktuatif selama tahun 2002 hingga 2018. Nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Nganjuk mengalami penurunan terbanyak pada tahun 2010 yakni sebesar 3,61 persen dengan jumlah angkatan kerja sebesar 503,871 jiwa. Kemudian peningkatan nilai TPAK terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 5,98 persen dengan jumlah angkatan kerja sebesar 555 941 jiwa. Kemudian Nilai Indeks Pembangunan Manusia tertinggi berada pada tahun 2018 sebesar 71,07 persen dan nilai terendah pada tahun 2002 yakni 64,7 persen. Selanjutnya nilai investasi di Kabupaten Nganjuk periode tahun 2002-2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya yakni dari Rp. 1.681.836 Juta menjadi Rp 101.389.463 Juta. Sedangkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 24.438 Juta pada tahun 2002 menjadi Rp 359.593 Juta pada tahun 2018.
3. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita tahun 2002-2018 di Kabupaten Nganjuk.



Kemudian secara parsial, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK yakni memiliki nilai $Prob > t$ yang lebih besar dibandingkan $\alpha = 0,05$. Kemudian untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap PDRB ADHK per kapita di Kabupaten Nganjuk tahun 2002-2018.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut

1. Struktur tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk memiliki jumlah lowongan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan jumlah pencari kerja. Hal tersebut juga didukung dengan pendidikan terakhir pencari kerja pada tingkat SMA Sederajat. Oleh sebab itu diharapkan para pencari kerja semakin mengasah keterampilan dan menciptakan usaha-usaha perekonomian agar nantinya dapat berperan aktif dalam aktifitas ekonomi.
2. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan investasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut perlu ditinjau oleh pemerintah daerah agar dilakukan evaluasi kembali dalam meningkatkan perekonomian daerah. Hal tersebut disebabkan karena tingginya tenaga kerja produktif dan investasi akan membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih lanjut indikator-indikator yang digunakan untuk melihat pengaruh sumber daya manusia agar lebih akurat dalam melihat pengaruh terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Nganjuk.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, A. (2009). *Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Dengan SPSS Dan Excel*. IAIT Press. Kediri
- Aprilianti, R. A. (2016). *Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2011-2015*. *Jurnal Ekonomi*. 6. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Arikunto, S. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara. Jakarta
- Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Unit Peberbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta. Yogyakarta
- Bhakti, N. A., Istiqomah, I., & Suprpto, S. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(4), 452.
- BPS. (2003a). *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2003*.
- BPS. (2003b). *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2003*.
- BPS. (2004). *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2004*.
- BPS. (2006a). *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2005/2006*.
- BPS. (2006b). *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2005-2006*.
- BPS. (2006c). *Kabupaten Nganjuk dalam Angka 2005/2006*.
- BPS. (2006d). *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2006*.
- BPS. (2007a). *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2007*.
- BPS. (2007b). *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2006-2007*.
- BPS. (2008). *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2008*.
- BPS. (2009a). *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2009*.
- BPS. (2009b). *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2009*.



- BPS. (2010a). *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2010*.
- BPS. (2010b). *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2010*.
- BPS. (2010c). *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2010*.
- BPS. (2010d). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Menurut Lapangan Usaha 2009*.
- BPS. (2011a). *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2011*.
- BPS. (2011b). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2011*.
- BPS. (2011c). *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2011*.
- BPS. (2011d). *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2011*.
- BPS. (2011e). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha 2006-2010*.
- BPS. (2012a). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2012*.
- BPS. (2012b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha 2011. 4(1)*.
- BPS. (2012c). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha 2007-2011*.
- BPS. (2013a). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2013*.
- BPS. (2013b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha 2008-2012*.
- BPS. (2013c). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha 2008-2012*.
- BPS. (2014a). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha 2009-2013*.
- BPS. (2014b). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha 2009-2013*.
- BPS. (2015a). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2015*.



BPS. (2015b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Menurut Lapangan Usaha 2010-2014.*

BPS. (2015c). *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Trenggalek 2010-2014.*

BPS. (2015d). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Lapangan Usaha 2010-2014.*

BPS. (2016a). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2016.*

BPS. (2016b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Menurut Lapangan Usaha 2011-2015.*

BPS. (2016c). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha 2011-2015.*

BPS. (2017a). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Menurut Lapangan Usaha 2012-2016.* 87.

BPS. (2017b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha 2012-2016.*

BPS. (2017c). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha 2012-2016.*

BPS. (2018a). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Nganjuk Tahun 2018.*

BPS. (2018b). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk Menurut Pengeluaran 2014-2018.*

BPS. (2018c). *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2018.*

BPS. (2018d). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Menurut Lapangan Usaha 2013-2017.*

BPS. (2018e). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kediri Menurut Lapangan Usaha 2013-2017.*

BPS. (2018f). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha 2013-2017.*

BPS. (2019a). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2018.*



- BPS. (2019b). *Statistik Daerah Kabupaten Nganjuk 2019*.
- BPS. (2019c). *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2019*.
- BPS. (2019d). *Kabupaten Kediri Dalam Angka 2019*.
- BPS. (2019e). *Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2019*.
- BPS. (2019f). *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka 2019*.
- BPS. (2019g). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Trenggalek Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*.
- BPS. (2019h). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tulungagung Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*.
- BPS. (2019i). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*.
- BPS. (2019j). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Blitar Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*.
- BPS. (2019k). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*.
- BPS. (2019l). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Kediri Menurut Lapangan Usaha 2014-2018*.
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Gujarati, Damodar, 2003, *Ekonometri Dasar* (Terjemahan). Erlangga. Jakarta.
- Harun, Rochajat., & Ardianto, Elvinaro. 2011. *Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Rajawali Pers, Jakarta
- Herjanto, E. 2008. *Manajemen Operasi Edisi Ketiga*. Hal 104-106. Grasindo. Jakarta.
- Hirawan, Susiyati B. 1987. *Keuangan Daerah di Indonesia*. LPFE UI. Jakarta
- Hukom, A. (2014). *Hubungan Ketenagakerjaan Dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 120-129.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta



- Kaho, J. R. 1998. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Kertonegoro, Sentanoe. 2001. *Ekonomi Tenaga Kerja*. Yayasan Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta
- Kristina, A. Y. D. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2016)*. Jurnal Ilmu Ekonomi, 1, 176–118.
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Mankiw, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan*. Edisi revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Merizal, Yos. 2008. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Minimum Kabupaten, dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik di Kabupaten Semarang*. FE:UNDIP: Semarang.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*. *Economics Development Analysis Journal*. Volume 1, Nomor. 2. Universitas Negeri Semarang. Semarang
- Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Muqorrobin, M. dan A. S. (2017). *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 5 No 3
- Pebrina, S. M. dan S. (2018). *Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi*. *Economis: Journal of Economics and Business*, 3(1), 36.
- Prawiroharjo, Sutrisno. 1984. *Retribusi Daerah*. Erlangga. Jakarta
- Pudjiyanto, B. dan M. Syawie. 2015. *Kemiskinan dan Pembangunan Manusia*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial RI. Jakarta
- Saefuddin, A., Notodiputro, K. A., Alamudi, A., dan Sadik, K. 2009. *Statistika Dasar*. Hal 101-102. Grafindo Media Pratama. Bandung
- Sasana, H. (2009). *Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota*



- Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 16(1), 50–69.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat Dan daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta
- Simanjuntak P.J. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*. LPFEUI. Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman. 1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, FE UI: Jakarta
- Simanjuntak, Payaman J. 2005, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Simarmata. 1984. *Pendekatan Sistem dalam Analisa Proyek Investasi dan Pasar Modal*. PT.Gramedia. Jakarta
- Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)*. Alfabeta. Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Makro ekonomi Modern*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sukirno, Sadono. 2012. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sulistiawati, R. (2012). *Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia*. *Machine Learning*, 76(2–3), 271–285.
- Sunarti E. 2012. *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan*. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB, Bogor.
- Suryono, Bagus Wiratno. 2010. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi Dan Tenaga*
- Sutawijaya, Adrian. 2010. *Pengaruh Ekspor dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1980-2006*. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol.6, No.1
- Suwandika, P. E. dan I. N. M. Y. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Broto (38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2016)*. 1, 176–188.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerahedisi 1*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta
- Tjahja, Supriatna. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Rineke Cipta. Jakarta
- Todaro, Michael. 2000. *Ekonomi Untuk Negara Berkembang*. Bumi Aksara. Jakarta.



Todaro, Michael, dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

United Nations Development Programme (UNDP). 1990. *Global Human Development Report*. Human Resources Department. New York.

United Nation Development Programme (UNDP). 1995. *The State Of Human Development UNDP*. New York.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Usman, H dan Nachrowi, D. 2004. *Teknik Pengambilan Keputusan*. PT Grasindo. Jakarta.

Wicaksono, Y. 2006. *Seri Solusi Bisnis Berbasis TI: Aplikasi Excel dalam*



LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Tenaga Kerja, Pencari Kerja dan Lowongan Kerja di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018

Tahun	Tenaga Kerja	Pencari Kerja	Lowongan Kerja
2002	501 774	1.583	4.333
2003	480 622	3.955	3.915
2004	563 760	4.255	2.930
2005	470 026	5.960	2.053
2006	525 370	1.695	5.115
2007	520 022	1.399	3.366
2008	517 169	6.255	3.510
2009	540 873	1.851	3.309
2010	485 507	2.169	1.243
2011	480 019	932	1.034
2012	508 859	1.101	903
2013	523 384	968	479
2014	513 031	1.385	1.075
2015	506 132	1.256	617
2016	506 221	3.123	6.486
2017	487 899	3.123	814
2018	541 279	1.358	691

Lampiran 2. Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Nganjuk Tahun 2015, 2017 dan 2018.

Lapangan Usaha	2015	2017	2018
Pertanian	219.902	194.039	222.127
Pertambangan dan Penggalian	1.342	2.661	1.756
Industri	43.271	52.428	66.857
Listrik, Gas dan Air Bersih	823	909	2.772
Konstruksi	51.213	28.516	33.132
Perdagangan	100.351	124.446	110.951
Angkutan dan Komunikasi	13.058	15.721	12.782
Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	8.800	4.253	14.864
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan perorangan	67.372	64.926	45.594
Jumlah	506.132	487.899	541.279

Lampiran 3. Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Terakhir Kabupaten Nganjuk

a. Jumlah Pencari Kerja Tahun 2005-2009

Pendidikan	Pencari Kerja								
	2005			2008			2009		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Tamat SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD Sederajat	733	259	992	23	13	36	920		902
SMP Sederajat	744	753	1.497	67	113	180	1.089	133	1.222
SMA Sederajat	3.479	3.284	6.403	1.022	466	1.488	1.044	581	1.631
Sarjana Muda	594	1.100	1.694	236	465	701	210	505	715
Sarjana	486	564	1.050	717	1.101	1.818	210	505	715
S-2	-	-	-	6	11	17	5	1	6

b. Jumlah Pencari Kerja Tahun 2010-2012

Pendidikan	Pencari Kerja								
	2010			2011			2012		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Tamat SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD Sederajat	23	13	36	34	38	72	7	24	31
SMP Sederajat	67	113	180	101	257	358	117	446	563

**Pendidikan****Pencari Kerja****2010****2011****2012**

	Laki- laki	Perempuan	Jumlah	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
SMA Sederajat	1.022	466	1.488	799	445	1.244	553	388	941
Sarjana Muda	246	465	701	46	67	113	26	95	121
Sarjana S-2	717	1.101	1.818	76	123	199	98	146	244
	-6	11	17	1	1	2	2	2	4

c. Jumlah Pencari Kerja Tahun 2013-2015

Pendidikan**Pencari Kerja****2013****2014****2015**

	Laki- laki	Perempuan	Jumlah	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Tamat SD									
SD Sederajat	7	20	31	37	62	99	10	37	47
SMP Sederajat	69	302	371	147	319	466	108	280	388
SMA Sederajat	355	215	570	640	409	1.049	824	675	1.499
Sarjana Muda	49	105	154	80	281	361	39	104	143
Sarjana S-2	181	325	506	204	314	518	127	157	284
	-4	1	5				3	3	6

d. Jumlah Pencari Kerja Tahun 2016-2018

Pendidikan	Pencari Kerja					
	2016		2017		2018	
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Tamat SD				1	1	
SD Sederajat	30	42	72	20	88	108
SMP Sederajat	90	210	300	84	345	429
SMA Sederajat	92	144	236	73	193	266
Sarjana Muda	4		6	3	6	8
Sarjana	3	1	2	2	2	2
S-2						4

Lampiran 4. Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Luas Wilayah di Kabupaten Nganjuk Tahun 2002-2018

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah penduduk	Kepadatan penduduk	Luas Wilayah km2
2002	503265	516064	1019329	833	1224,33
2003	505899	518729	1024691	837	1224,33
2004	507105	520266	1027371	839	1224,33
2005	511315	525283	1036598	847	1224,33
2006	514817	528686	1043503	852	1224,33
2007	526337	537218	1063555	869	1224,33
2008	529408	539891	1069299	873	1224,33
2009	505265	511128	1002530	819	1224,33
2010	505687	513332	1019019	832	1224,33
2011	508923	515182	1024105	836	1224,33
2012	508567	516946	1028914	840	1224,33
2013	513398	520199	1033597	844	1224,33
2014	515597	522126	1037723	848	1224,33
2015	517712	524004	1041716	851	1224,33
2016	519717	525658	1045375	854	1224,33
2017	521388	527411	1048799	857	1224,33
2018	522970	528930	1051900	859	1224,33

Lampiran 5. Nilai PDRB ADHK Per Kapita, TPAK, IPM, Investasi dan PAD di Kabupaten Nganjuk

TAHUN	PDRB ADHK Per Kapita (juta)	TPAK (%)	IPM (%)	INVESTASI (000)	PAD (Juta)
2002	3,121277	68,65	64,7	1681836	24438
2003	3,244947	72,61	65,8	1696936	36773
2004	3,403536	68,57	67,16	10251473	35293
2005	3,565213	67,83	67,51	11873285	40295
2006	3,74989	67,63	68,47	14408634	52034
2007	3,904453	68,86	69,25	17001634	53168
2008	4,115574	68,14	69,73	50960793	58812
2009	4,960769	69,27	70,27	56947704	71274
2010	5,193028	65,66	65,6	77972966	79507
2011	11,77728	65,55	66,58	77303572	94283
2012	12,40821	67,57	68,07	81168751	125215
2013	13,01861	69,64	68,98	84618275	153142
2014	13,62853	67,17	69,59	89319000	225958
2015	14,282	64,48	69,9	89898923	287881
2016	14,982	63,14	70,5	91538245	232045
2017	15,71857	61,98	70,69	99776687	332495
2018	16,51693	67,91	71,07	101389463	359593

Lampiran 6. Nilai Ln PDRB ADHK Per Kapita, Ln TPAK, Ln IPM, Ln Investasi dan Ln PAD di Kabupaten Nganjuk

TAHUN	Ln PDRB ADHK Per Kapita	Ln TPAK	Ln IPM	Ln INVESTASI	Ln PAD
2002	1,138	4,229	4,170	7,428	10,104
2003	1,177	4,285	4,187	7,437	10,513
2004	1,225	4,228	4,207	9,235	10,471
2005	1,271	4,217	4,212	9,382	10,604
2006	1,322	4,214	4,226	9,576	10,860
2007	1,362	4,232	4,238	9,741	10,881
2008	1,415	4,222	4,245	10,839	10,582
2009	1,602	4,238	4,252	10,950	11,174
2010	1,647	4,184	4,184	11,254	11,284
2011	2,466	4,183	4,198	11,256	11,454
2012	2,518	4,213	4,221	11,304	11,738
2013	2,566	4,243	4,234	11,346	11,939
2014	2,612	4,207	4,243	11,400	12,328
2015	2,659	4,166	4,247	11,406	12,570
2016	2,707	4,129	4,256	11,425	12,355
2017	2,755	4,127	4,258	11,511	12,174
2018	2,804	4,218	4,264	11,527	12,793

Lampiran 7. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (PDRB ADHK 2000) di Kabupaten Nganjuk

	Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Pertanian	1256933,22	1337851,37	1457596	1671193,2	1310265,1	1361933,45	1418153,4	1815295,3
	a. Tanaman Bahan Makanan	837040,1	887719,99	958995,09	1115186,11	894709,48	928308,55	969003,71	1106552,74
	b. Tanaman Perkebunan	236791,21	255410,19	285219,21	318810,72	241606,56	250715,13	261912,46	146503,62
	c. Peternakan	155991,16	164772,24	180614,26	201166,3	149481,14	157674,43	163915,7	445760,15
	d. Kehutanan	23368,27	25637,48	27357,96	29717	20214,94	20661,69	18703,72	25518,87
	e. Perikanan	3742,48	4311,47	5409,48	6313,07	4252,98	4573,65	4617,81	90959,93
2	Pertambangan dan Penggalian	64456,67	72196,07	78470,77	89680,2	64659,24	66676,61	67910,14	64139,82
3	Industri	324693,38	346404,67	387822,86	455284,23	344319,21	359589,27	375239,1	416521
	a. Makanan, Minuman dan Tembakau	144817,01	157644,13	181183,96	214297,68	161994,54	169608,28	177647,04	274675,39
	b. Pakaian jadi dan kulit	769,48	852,94	1001,61	1198,09	879,2	948,31	1003,49	757,97
	c. Kayu, Bambu dan Sejenisnya	69182,38	73277,74	81423,66	92720,73	68644,6	71362,93	74262,03	5014,36
	d. Kertas dan Barang Cetak	3265,32	3591,86	3944,49	4440,77	2726,16	2793,77	2913,74	74840,21
	e. Kimia, Karet dan Plastik	144,64	164	187,46	214,1	146,49	151,4	159,09	57682,27
	f. Barang Galian Non Logam	55751,6	57058,71	60489,74	72968,42	55814,34	58164,12	60804,85	790,72
	g. Logam Dasar Besi dan Baja	0	0	0	0	0	0	0	876,58
	h. Alat Angkutan dan Mesin	2438,78	2466,5	2663,69	3219,88	2742,73	2872,47	2905,11	0
	i. Barang lainnya	48324,18	51.348,78	56928,25	66224,57	51371,15	53687,99	55543,77	1883,53
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	11953,62	13089,83	14678,39	15775,23	16493,44	17505,64	18406,89	26918,05
	a. Listrik	11323,6	12368,39	13919,48	14974,79	15653,31	16629,97	17528,27	25278,67
	b. Air Bersih	630,02	721,44	758,91	800,44	840,13	875,67	878,62	1639,39
5	Bangunan	80469,25	82305,74	84961,93	89764,92	93872,02	98912,95	104472,47	28722,98
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1075808,93	1165811,8	1248589,28	1341716,29	1447749,1	1574264,89	1698077,52	1495327,09



Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Lapangan Usaha								
a. Perdagangan	1042249,59	1131986,53	1213560,13	1305043,86	1411973,99	1536651,29	1659878,58	1482831,03
b. Hotel	11477,59	10914,79	11102,67	11570,13	9478,75	9814,3	9959,29	1577,24
c. Restoran	22081,75	22910,48	23926,49	25102,3	26296,36	27799,3	28239,65	10918,81
7 Angkutan dan Komunikasi	72720,89	75791,79	78858,14	82558,14	86906,6	92411,95	98233,27	102310,86
a. Angkutan Rel	4170,17	4192,4	4214,65	4465,55	4672,34	4912,5	5233,6	2599,48
b. Angkutan Jalan Raya	39017,4	41519,9	43768,01	45094,27	47233,55	49547,99	54635,44	54957,49
c. Penunjang Jasa Angkutan	17917,02	18341,73	18703,86	20320,24	21209,81	22357,27	22361,82	27562,69
d. Pos dan Telekomunikasi	10320,25	10429,62	10852,42	11284,86	11578,96	13166,37	13444,75	14178,82
d. Jasa Perusahaan	1296,04	1308,14	1319,2	1393,12	2211,93	2427,82	2557,66	3011,93
8 Keuangan, Sewa dan Jasa								
Perusahaan	132223,13	138741,44	144452,66	150688,39	155360,26	162998,68	1722996,34	187420,62
a. Bank	10360,21	10588,04	11151,06	11864,86	12675,65	13679,09	14386,62	45715,06
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	16144,69	16922,43	17475,8	18875,84	20005,56	21131,87	21262,87	29627,11
c. Sewa Bangunan	100000,61	104779,28	108912,83	112524,56	116276,58	121322,99	130387,42	86717,15
d. Jasa Perusahaan	5717,61	6451,7	6912,96	7423,13	6402,47	6864,73	6959,43	25361,3
9 Jasa-Jasa	335205,59	343948,62	358882,88	375005,03	393396,5	416508,09	447290,38	842665,31
a. Pemerintahan Umum	188376,16	192773,69	199242,7	206445,16	2142151,23	227484,01	246735,64	454273,44
b. Sosial Kemasyarakatan	24606,39	25645,06	27100,34	28914,64	29804,83	31333,1	32711,1	40094,16
c. Hiburan dan Kebudayaan	5684,62	5919,95	6196,86	6579,55	4921,06	4990,29	5044,42	7751,55
d. Perorangan dan RT	116538,42	119609,92	126342,97	133065,68	144419,38	152700,69	162790,44	340546,16
Produk Domestik Regional Bruto	3181608,04	3325068,02	3496694,92	3695693,03	3913021,49	4150801,53	4400779,53	4979320,58

Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				
Repository Universitas Brawijaya				

Lampiran 8. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (PDRB ADHK 2010) di Kabupaten Nganjuk

Lapangan Usaha		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.089.143,03	4.233.514,75	4.397.228,25	4.451.210,58	4.538.475,50
2	Pertambangan dan Penggalian	238.350,27	251.414,85	260.653,36	269.963,64	283.290,90
3	Industri Pengolahan	1.511.762,43	1.582.763,78	1.650.885,84	1.745.526,67	1.836.090,40
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.138,65	6.577,01	7.072,16	7.332,99	7.745,80
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.278,80	14.892,50	15.186,70	15.668,70	15.974,30
6	Konstruksi	1.013.631,40	1.073.985,30	1.141.151,00	1.226.485,90	1.308.906
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.821.367,52	1.994.283,07	2.212.855,90	2.456.956,00	2.655.858,70
8	Transportasi dan Pergudangan	152.695,57	158.835,66	169.976,21	183.833,37	198.628,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	189.951,15	203.159,21	216.420,15	233.886,54	250.492,40
10	Informasi dan Komunikasi	500.621,80	540.166,30	590.881,60	650.860,90	700.087,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	229.916,33	252.160,57	276.078,50	307.700,13	331.106,00
12	Real Estat	192.403,60	204.569,30	217.168,40	233.269,80	248.269,00
13	Jasa Perusahaan	38.653,40	40.397,40	42.155,20	44.767,50	47.634,50
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	611.427,40	653.107,90	671.776,70	687.052,20	696.115,90
15	Jasa Pendidikan/Education	395.369,00	419.465,40	442.741,10	476.493,70	504.288,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosia	59.280,90	66.593,50	72.372,80	77.956,40	87.278,40
17	Jasa Lainnya	340.455,20	365.287,20	382.373,60	404.812,60	432.638,10
Produk Domestik Regional Bruto		11.405.446,45	12.061.173,70	12.766.977,47	13.473.777,62	14.142.879,90

Lampiran 9. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (PDRB ADHK 2010) di Kabupaten Nganjuk

Lanjutan

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.694.528,40	4.848.147,60	4.885.818,00	4.861.809,00
2 Pertambangan dan Penggalian	296.067,20	308.165,90	330.773,00	340.993,90
3 Industri Pengolahan	1.941.065,10	2.052.111,70	2.199.631,70	2.417.792,70
4 Pengadaan Listrik dan Gas	7.851,90	8.135,30	8.490,30	8.861,30
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.854,90	17.762,50	18.983,10	19.936,90
6 Konstruksi	1.352.035,40	1.443.101,80	1.588.160,50	1.771.580,00
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.850.801,80	3.032.854,40	3.283.514,90	3.535.488,20
8 Transportasi dan Pergudangan	212.979,40	228.491,60	248.013,20	269.325,60
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	271.070,70	293.909,50	320.434,40	344.563,40
10 Informasi dan Komunikasi	748.005,30	805.282,50	867.929,10	927.298,00
11 Jasa Keuangan dan Asuransi	353.357,80	379.195,20	393.596,30	414.008,10
12 Real Estat	261.519,50	276.783,50	290.071,10	307.515,20
13 Jasa Perusahaan	50.382,80	53.197,50	56.470,00	60.584,00
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	737.673,20	773.855,00	796.041,30	832.403,70
15 Jasa Pendidikan/Education	537.021,80	570.005,30	597.683,10	629.978,50
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88.947,20	94.157,00	100.158,30	107.539,70
17 Jasa Lainnya	455.188,50	476.657,60	499.855,50	524.482,70
Produk Domestik regional Bruto	14.875.350,90	15.661.813,90	16.485.623,80	17.374.160,90

Lampiran 10. Persentase Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (PDRB ADHK 2000) di Kabupaten Nganjuk

Lapangan Usaha	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	35,69	34,83	34,28	33,81	33,48	32,81	32,23	36,46
Pertambangan dan Penggalian	1,80	1,77	1,71	1,68	1,65	1,61	1,54	1,29
Industri	8,82	8,67	8,81	8,88	8,80	8,66	8,53	8,37
Listrik, Gas dan Air Bersih	0,38	0,39	0,42	0,43	0,42	0,42	0,42	0,54
Bangunan	2,53	2,48	2,43	2,43	2,40	2,38	2,37	0,58
Perdagangan, Hotel dan Restoran	33,81	35,06	35,71	36,30	37	37,93	38,59	30,03
Angkutan dan Komunikasi	2,29	2,28	2,26	2,23	2,22	2,23	2,23	2,05
Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan	4,16	4,17	4,13	4,08	3,97	3,93	3,93	3,76
Jasa-Jasa	10,54	20,34	20,26	10,15	10,05	10,03	10,16	16,92
Produk Domestik Regional Bruto	100							

Lampiran 11. Persentase Kontribusi Sektor-Sektor Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (PDRB ADHK 2010) di Kabupaten Nganjuk.

Lapangan Usaha	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,85	35,10	34,44	33,04	32,09	31,56	30,96	29,64	27,98
Pertambangan dan penggalian	2,09	2,08	2,04	2	2	1,99	1,97	2,01	1,96
Industri Pengolahan	13,25	13,12	12,93	12,95	12,98	13,05	13,10	13,34	13,92
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,13	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11
Konstruksi	8,89	8,90	8,94	9,10	9	9,09	9,21	9,63	10,20
Perdagangan Besar dan Eceran	15,97	16,53	17,33	18,24	18,78	19,16	19,36	19,92	20,35
Transportasi dan Pergudangan	1,34	1,32	1,33	1,36	1,40	1,43	1,46	1,50	1,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,67	1,68	1,70	1,74	1,77	1,82	1,88	1,94	1,98
Informasi dan Komunikasi	4,39	4,48	4,63	4,83	4,95	5,03	5,14	5,26	5,34
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,02	2,09	2,16	2,28	2,34	2,38	2,42	2,39	2,38
Real Estate	1,69	1,70	1,70	1,73	1,76	1,76	1,77	1,76	1,77
Jasa Perusahaan	0,34	0,33	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34	0,35
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,36	5,41	5,26	5,10	4,92	4,96	4,94	4,83	4,79
Jasa pendidikan	3,47	3,48	3,47	3,54	3,57	3,61	3,64	3,63	3,63
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,52	0,55	0,57	0,58	0,62	0,60	0,60	0,61	0,62
Jasa Lainnya	2,99	3,03	3,00	3,00	3,06	3,06	3,04	3,03	3,02
Produk Domestik Regional Bruto	100								

Lampiran 12. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Berdasarkan Tahun 2000 dan 2010 di Kabupaten/Kota se Karisidenan Kediri

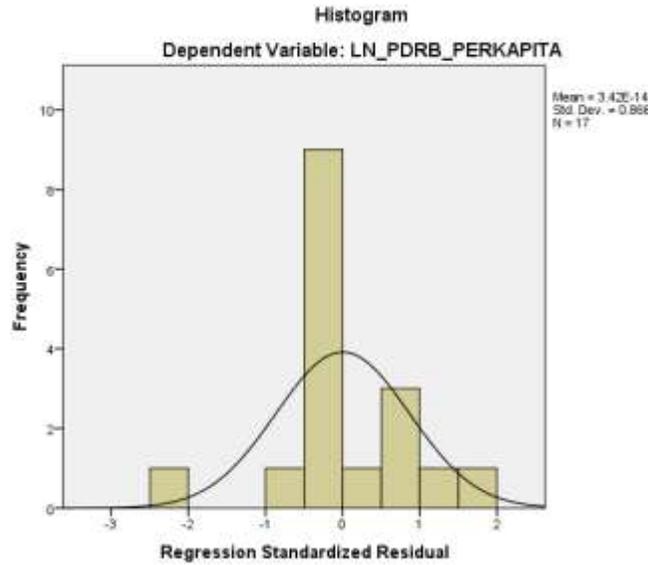
Tahun	PDRB ADHK Tahun 2000 dan 2010 (Miliar Rupiah)						Kota Blitar
	Kota Kediri	Kabupaten Kediri	Kabupaten Tulungagung	Kabupaten Blitar	Kabupaten Nganjuk	Kabupaten Trenggalek	
2002	6.353,75	4.600,2	5.124,90	3.771,93	3.121	547,6	416,61
2003	6.596,14	4.620,7	5.320,86	3.947,30	3.244,94	565,01	501,96
2004	6.968,28	4.724,1	5.588,46	4.124,78	3.403,53	1.595,7	531,14
2005	7.458,34	4.834	5.874,96	4.338,52	3.565,21	1.663,5	562,89
2006	19.768,50	4.955,4	6.196,73	4.571,92	3.749,89	1.837,9	608,29
2007	20.660,13	6.566,2	6.552,88	4.836,20	3.904,45	2.590,2	645,94
2008	21.622,40	6.860,8	6.936,74	5.128,53	4.115,57	2.735,5	873,37
2009	21.741,61	7.200,4	7.353,50	5.394,40	4.960,76	2.889,7	927,58
2010	57.550,59	7.635,1	16.776,31	16.213,91	5.193,02	7.962,1	2.854,95
2011	60.020,07	19.351,9	17.845,22	17.093,90	11.777,28	8.435,2	3.038,43
2012	63.185,08	20.538,3	18.999,03	18.054,45	12.408,21	8.959,5	3.236,61
2013	65.408,80	21.733,5	20.144,37	18.967,27	13.018,61	9.946,7	3.446,83
2014	69.232,89	22.890	21.265,20	19.920,15	13.628,53	9.998,5	3.649,64
2015	72.945,52	24.007,7	22.326,62	20.928,47	14.282	10.501,6	3.856,91
2016	76.988,36	25.211,9	23.446,44	21.991,42	14.982	11.028,5	4.079,26
2017	80.946,16	25.446,2	24.537,37	23.107,48	15.718,57	11.579,9	4.315,01
2018	85.335,95	27.789,5	25.920,20	24.286,24	16.516,93	12.161,8	4.566,47



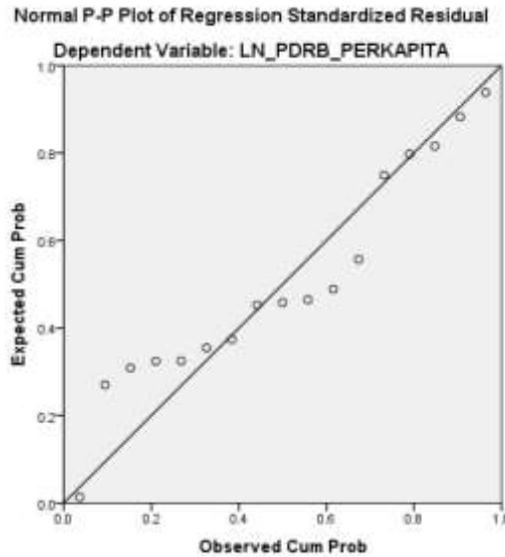
Lampiran 13. Data Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

a. Grafik Histogram



b. Grafik Normal Plot





Lanjutan Lampiran 13. Uji Asumsi Klasik

c. Tabel One-Sample Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		17
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.17671761
Most Extreme Differences	Absolute	.181
	Positive	.160
	Negative	-.181
Test Statistic		.181
Asymp. Sig. (2-tailed)		.142 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

2. Uji Multikolinearitas

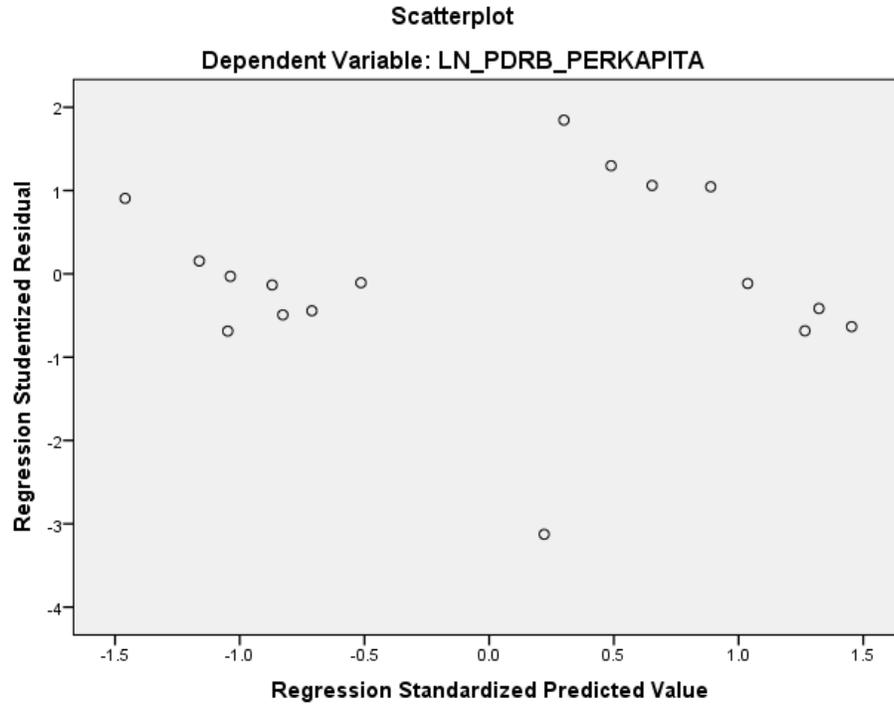
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.208	11.887		1.195	.255
LN_TPAK	.565	1.681	.033	.336	.743
LN_IPM	-5.839	2.656	-.247	-2.198	.048
LN_INVEST	.062	.069	.125	.900	.386
ASI					
LN_PAD	.821	.121	1.046	6.775	.000

a. Dependent Variable: LN_PDRB_PERKAPITA



Lanjutan Lampiran 13. Uji Asumsi Klasik
3. Uji Heteroskedastisitas



4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 ^a	.932	.909	.204056	2.041

a. Predictors: (Constant), LN_PAD, LN_TPAK, LN_IPM, LN_INVESTASI

b. Dependent Variable: LN_PDRB_PERKAPITA



Lampiran 14. Data Hasil Uji Hipotesis

1. Uji Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.965 ^a	.932	.909	.204056	2.041

a. Predictors: (Constant), LN_PAD, LN_TPAK, LN_IPM, LN_INVESTASI

b. Dependent Variable: LN_PDRB_PERKAPITA

2. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.843	4	1.711	41.088	.000 ^b
	Residual	.500	12	.042		
	Total	7.343	16			

a. Dependent Variable: LN_PDRB_PERKAPITA

b. Predictors: (Constant), LN_PAD, LN_TPAK, LN_IPM, LN_INVESTASI

3. Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.208	11.887		1.195	.255
	LN_TPAK	.565	1.681	.033	.336	.743
	LN_IPM	-5.839	2.656	-.247	-2.198	.048
	LN_INVES TASI	.062	.069	.125	.900	.386
	LN_PAD	.821	.121	1.046	6.775	.000

a. Dependent Variable: LN_PDRB_PERKAPITA